

**PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
Triwulan III - 2005**

**Kantor Bank Indonesia
Bengkulu**

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

Penerbit :

Bank Indonesia Bengkulu
Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter
Jl. A. Yani No.1

BENGKULU

Telp: (0736) 21735, Fax: (0736) 21736

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan.

Nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan.

Visi Kantor Bank Indonesia Bengkulu

Menjadi Lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang berhasil guna, peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Misi Kantor Bank Indonesia Bengkulu

Merupakan bagian jaringan kerja Bank Indonesia yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

KATA PENGANTAR

Penerbitan Perkembangan Perekonomian Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai keadaan ekonomi, moneter dan perbankan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya guna merumuskan suatu kebijakan.

Dalam kajian ini dibahas mengenai perkembangan perekonomian regional Provinsi Bengkulu, yang meliputi perkembangan kegiatan sektor riil dan perkembangan kegiatan sektor moneter perbankan, khususnya selama Triwulan III (Juli sampai dengan September) tahun 2005 dan membandingkannya dengan periode/kondisi laporan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam kajian yang kami susun ini, oleh karena itu kritik serta saran dari pengguna/pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan terbitan berikutnya.

Akhirnya kami berharap, semoga terbitan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, Oktober 2005
BANK INDONESIA BENGKULU



Syarifuddin Bassara
Pemimpin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I KONDISI MAKROEKONOMI REGIONAL	6
1.1. PDRB SISI PERMINTAAN	7
1.1.1. Konsumsi Daerah	7
1.1.2. Investasi Regional	8
1.1.3. Ekspor dan Impor Regional	10
1.2. PDRB SISI PENAWARAN	12
1.3. KETENAGAKERJAAN	13
1.3.1. Pekerja	14
1.3.2. Pengangguran	15
1.3.3. Partisipasi dan Produktivitas Angkatan Kerja	16
1.3.4. Upah Minimum Regional	16
BOKS 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Musi, Bengkulu	
BAB II INFLASI REGIONAL	18
2.1. KAJIAN UMUM	18
2.2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INFLASI	19
2.2.1. Pendorong Inflasi	20
2.2.2. Pendorong Deflasi	21
2.3. INFLASI 2005	22
BAB III MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	24
3.1. PERBANKAN	24
3.1.1. Gambaran Umum	24
3.1.2. Perkembangan Bank Umum	25
3.1.3. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	30
3.2. SISTEM PEMBAYARAN	31

3.2.1. Aliran Uang Kartal (<i>outflow-inflow</i>)	31
3.2.2. <i>Clean Money Policy</i>	32
3.2.3. Penemuan Uang Palsu	33
3.2.4. Perkembangan Kliring Lokal	34
BOKS 2 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	
BOKS 3 Syarat-Syarat Pendirian BPR/BPRS	
BOKS 4 Penerbitan Uang Baru Pecahan Rp50.000 dan Rp10.000	
BAB IV KEUANGAN DAERAH	36
4.1. GAMBARAN SISI PENERIMAAN	36
4.2. GAMBARAN SISI PENGELUARAN	37
BAB V PROSPEK PEREKONOMIAN	39
5.1. PROSPEK PEREKONOMIAN.....	39
5.2. PROSPEK HARGA	39
DAFTAR ISTILAH	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	PDRB Berdasarkan Jenis Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan	7
Tabel 1.2.	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi Bengkulu Tahun 1997 – 2005	8
Tabel 1.3.	Perkembangan Ekspor dan Impor Regional dalam pembentukan PDRB menurut Harga Berlaku Provinsi Bengkulu	10
Tabel 1.4.	Perkembangan Ekspor Barang-Barang Non-Migas Utama Menurut Jenis Barang di Provinsi Bengkulu	11
Tabel 1.5.	Perkembangan Ekspor Barang-Barang Non-Migas Utama Menurut Negara Pembeli di Provinsi Bengkulu	11
Tabel 1.6.	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu (q-t-q) menurut Sektor	12
Tabel 1.7.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Lapangan Usaha Provinsi Bengkulu	13
Tabel 1.8.	Penduduk Provinsi Bengkulu berumur 15 Tahun keatas menurut Kegiatan Tahun 2005	13
Tabel 1.9.	Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Sub-Sektor Tahun 2005	14
Tabel 1.10.	Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja menurut Pendidikan Tahun 2005	15
Tabel 1.11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Produktivitas Tenaga kerja Provinsi Bengkulu Tahun 2005	16
Tabel 1.12.	Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2004 dan 2005	17
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Kelompok Barang/jasa Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)	19
Tabel 2.2.	Inflasi Kelompok Bahan Makanan Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)	20
Tabel 2.3.	Sumbangan 10 Komoditas dengan Sumbangan Inflasi dan Deflasi Terbesar terhadap Inflasi Kota Bengkulu	21
Tabel 2.4.	Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)	21
Tabel 2.5.	Inflasi Kelompok Pengangkutan, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)	22
Tabel 3.1.	Jaringan Kantor Pelayanan Bank Provinsi Bengkulu	26
Tabel 3.2.	Perkembangan Aktiva Perbankan Provinsi Bengkulu	26
Tabel 3.3.	Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Bengkulu	28

Tabel 3.4.	Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan, Sektor ekonomi dan Kelompok Bank di Provinsi Bengkulu	29
Tabel 3.5.	Perkembangan Kredit Usaha Kecil di Provinsi Bengkulu	29
Tabel 3.6.	Perkembangan Kegiatan Usaha BPR di Provinsi Bengkulu	30
Tabel 3.7.	Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Uang Kartal Provinsi Bengkulu	32
Tabel 3.8.	Perkembangan Kliring dan Cek/Bilyet Giro Kosong Provinsi Bengkulu	35
Tabel 4.1.	Rekapitulasi Anggaran Pendapatan yang Diterima Provinsi Bengkulu Tahun 2005	36
Tabel 4.2.	Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 dan 2005	37
Tabel 4.3.	Rekapitulasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2005	37
Tabel 4.4.	Rekapitulasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2005 menurut Kabupaten/Kota	38
Tabel 4.5.	Realisasi Upah/Gaji Pemda Dirinci Menurut Kabupaten/Kota	38
Tabel 5.1.	Perkiraan Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha di Provinsi Bengkulu	39
Tabel 5.2.	Perkembangan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB (y-o-y) Provinsi Bengkulu (harga konstan 1993)	6
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi IHK Kota Bengkulu	18
Grafik 2.2.	Realisasi dan Proyeksi Inflasi 2005	23
Grafik 3.1.	Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Perbankan Provinsi Bengkulu	24
Grafik 3.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Kredit Perbankan Provinsi Bengkulu	25
Grafik 3.3.	Distribusi Aktiva Bank Umum di Provinsi Bengkulu	27
Grafik 3.4.	Perkembangan <i>Net Interest Margin</i> BPR Provinsi Bengkulu	31
Grafik 3.5.	Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> Uang Kartal Provinsi Bengkulu	31
Grafik 3.6.	Perkembangan Rasio PTTB terhadap <i>Inflow</i> Provinsi Bengkulu	33
Grafik 3.7.	Perkembangan Jumlah Uang Palsu yang Ditemukan di Provinsi Bengkulu	34
Grafik 5.1.	Pola Inflasi Triwulanan Kota Bengkulu	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

KONDISI MAKROEKONOMI

Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada Triwulan III tahun 2005 sedikit meningkat, hanya sebesar 0,50% (q-t-q) meski masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,01%. Rendahnya tingkat pertumbuhan disebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga karena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan antisipasi penjual terhadap kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005.

Secara tahunan, perekonomian Provinsi Bengkulu juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,84% (y-o-y) lebih tinggi bila dibandingkan laju pertumbuhan tahunan pada Triwulan III tahun 2004 sebesar 4,46% (y-o-y).

PDRB sisi Permintaan

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian nasional, perputaran perekonomian Provinsi Bengkulu lebih digerakkan oleh tingkat konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 83,90% (masing-masing 65,48% dan 18,42%). Kondisi ini perlu disikapi secara hati-hati, karena tingkat konsumsi

berlebihan tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi dapat mengakibatkan kenaikan harga.

Konsumsi Daerah

Pada Triwulan III tahun 2005 sebagian besar pendapatan regional digunakan untuk pengeluaran konsumsi baik konsumsi rumah tangga (65,48%) maupun konsumsi pemerintah (18,42%).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan cenderung stagnan (0,25% dan 2,83%) sedangkan atas dasar harga berlaku meningkat tajam (8,24% dan 7,47%). Hal ini menunjukkan peningkatan harga barang dan jasa.

Investasi Regional

Investasi terus tumbuh positif walau berjalan sangat lambat (1,30%; q-t-q) dengan porsi dalam pembentukan PDRB sebesar 11,58%.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, sejak tahun 1997 sampai dengan 2005 minat investor, baik PMDN maupun PMA, untuk menanamkan investasinya di Bengkulu tampak cukup besar. Namun hanya

sedikit rencana investasi yang diikuti oleh realisasi investasi.

Rendahnya realisasi investasi dibandingkan rencana investasi tersebut hendaknya mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah. Upaya nyata guna mengurangi hambatan-hambatan yang dialami oleh investor harus segera diambil.

Ekspor dan Impor Regional

Lintas barang dan jasa dari dan ke Provinsi Bengkulu (ekspor dan impor regional) mengalami net impor (arus barang dan jasa masuk lebih besar dibanding keluar) sebesar Rp2.888 juta.

Berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kinerja ekspor Provinsi Bengkulu masih ditopang oleh sektor perkebunan, antara lain: karet (49,22%) dan *crude palm oil* (32,04%).

PDRB sisi Penawaran

PDRB Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti pertanian tanaman pangan, sayuran, perkebunan dan perikanan.

Pada Triwulan III tahun 2005, sektor pertanian memiliki porsi 32,88% dari PDRB dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,25%.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi (2,98%) diikuti oleh sektor keuangan dan persewaan (1,91%).

INFLASI

Kajian Umum

Laju inflasi IHK Provinsi Bengkulu selama Triwulan III tahun 2005 sebesar 2,94% (q-t-q) meningkat 2,30% bila dibandingkan dengan laju inflasi pada Triwulan II tahun 2005 (0,64%).

Laju inflasi tahunan (y-o-y) pada triwulan laporan berada pada posisi *double-digit* (12,41%) atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan inflasi pada tahun 2004.

Secara umum, inflasi pada triwulan ini disebabkan oleh antisipasi masyarakat akan kenaikan BBM yang akan diumumkan oleh pemerintah pada awal Triwulan IV tahun 2005.

Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Inflasi terjadi pada semua kelompok kecuali kelompok pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan (-0,09%). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (6,11%) diikuti oleh kelompok bahan makanan (5,34%).

Karena memiliki bobot yang besar, maka kelompok bahan makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Bengkulu (1,55%) diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,62%).

Arah Inflasi

Pada tanggal 30 September 2005, pemerintah menaikkan harga jual BBM yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2005. Sebelumnya masyarakat memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM berada pada kisaran 50%, namun kenyataannya kenaikan harga yang diumumkan pemerintah jauh lebih tinggi dari perkiraan dan mencapai sekitar 100%.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pada Oktober 2005 inflasi Bengkulu mencapai 12,51% (m-t-m) sehingga inflasi Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV tahun 2005 diperkirakan akan sangat tinggi hingga mencapai 12%-15% (q-t-q) sehingga pada tahun 2005 inflasi Provinsi Bengkulu diperkirakan melampaui 20% (y-o-y).

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Perbankan

Fungsi intermediasi perbankan terus menunjukkan perkembangan. *Loan to Deposits Ratio* (LDR) meningkat dari sebesar 81,91% pada Triwulan II tahun 2005 menjadi sebesar 88,40% pada Triwulan III tahun 2005.

Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 3,16% yaitu dari Rp1.784.428 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi Rp1.840.776 juta pada triwulan laporan.

DPK dalam bentuk tabungan dan deposito meningkat masing-masing sebesar 5,45% dan 2,69%. Sedangkan DPK dalam bentuk giro mengalami penurunan (-0,73%).

Jumlah dana yang dihimpun masyarakat terutama deposito diperkirakan akan meningkat pada Triwulan IV tahun 2005 seiring dengan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Total kredit yang disalurkan sampai dengan triwulan laporan sebesar Rp1.627.286 juta, meningkat 11,34% dibanding posisi Triwulan II tahun 2005 sebesar Rp1.461.556 juta.

Dilihat dari sisi sektor ekonomi yang dibiayai, pertumbuhan kredit secara persentase terbesar terjadi di sektor jasa sosial (187,84%) disusul oleh sektor konstruksi (60,34%) dan sektor pertanian (15,86%). Sedangkan penurunan kredit dialami oleh sektor perindustrian (-29,07%) dan sektor pengangkutan (-12,30%).

Namun Jika dilihat dari nominal, sektor lain-lain (sebagian besar merupakan kredit konsumsi) mengalami peningkatan tertinggi (Rp99.742 juta) diikuti oleh sektor pertanian (Rp21.565 juta). Sedangkan sektor jasa sosial yang mengalami peningkatan persentase tertinggi meningkat sebesar Rp15.386 juta.

Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) mencapai sebesar Rp476.349 juta atau meningkat Rp42.093 juta (9,69%) jika dibandingkan Triwulan II tahun 2005. Proporsi KUK terhadap total kredit sedikit menurun dari 29,71% menjadi 29,27%.

Sistem Pembayaran

Di bidang sistem pembayaran regional, walaupun terjadi peningkatan tajam *cash inflow*, posisi kas Bank Indonesia Bengkulu pada Triwulan III tahun 2005 masih mengalami *net cash outflow*.

Sementara data uang palsu yang ditemukan oleh Bank Indonesia berdasarkan laporan masyarakat dan perbankan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah dan nominal.

Kegiatan transaksi antar bank yang dicerminkan oleh tingkat perputaran kliring daerah meningkat baik dari sisi nominal maupun dari sisi jumlah warkat yang dikliringkan.

Nominal kliring perbankan meningkat tajam sebesar 21,38% bila dibandingkan nominal kliring pada triwulan sebelumnya dan jumlah warkat yang dikliringkan juga meningkat sebesar 16,12% bila dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan meningkatnya aktivitas perdagangan di Provinsi Bengkulu.

KEUANGAN DAERAH

Pangsa terbesar penerimaan APBD masih sangat tergantung dari pos-pos dana perimbangan keuangan pusat. Sementara sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Ini berarti keuangan Provinsi Bengkulu masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat.

Gambaran Sisi Penerimaan

Sumber dana APBD 2005 Provinsi Bengkulu sebagian besar berasal dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dan hanya menyumbang kurang dari 10% APBD.

Pendapatan Provinsi dan Kabupaten /Kota tahun 2005 dianggarkan sebesar Rp1,496 triliun.

Gambaran Sisi Pengeluaran

Total anggaran pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp1,647 triliun atau defisit sebesar Rp150 miliar. Sebagian besar defisit dibiayai dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Pengeluaran terbesar diperuntukan untuk membiayai pos belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik dengan anggaran masing-masing

sebesar Rp761 miliar (46,20%) dan Rp760 miliar (46,17%).

PROSPEK PEREKONOMIAN

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), perkembangan kegiatan usaha pada Triwulan IV tahun 2005 diperkirakan akan mengalami peningkatan (Saldo Bersih Tertimbang; SBT 28,68%). Sektor pertanian akan mengalami peningkatan tertinggi (SBT

11,30%) diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel (SBT 5,35%) dan sektor jasa-jasa (SBT 5,06).

Secara sektoral, sektor pertanian masih menjadi penggerak bagi perkembangan perekonomian di Provinsi Bengkulu.

Sementara hasil Survei Ekspektasi Konsumen (SEK) menunjukkan bahwa rata-rata harga jual barang dan jasa secara umum diekspektasikan akan meningkat.

BAB

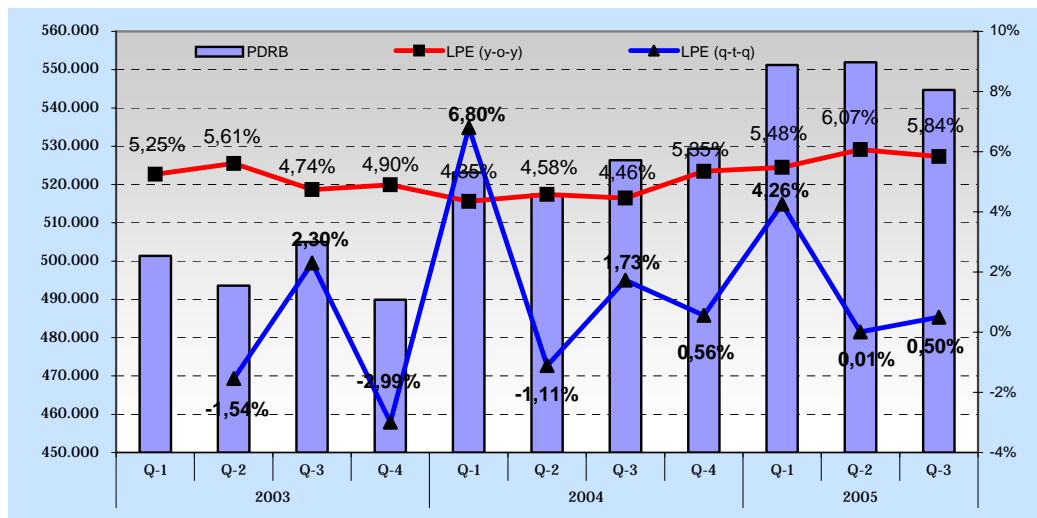
1

KONDISI MAKROEKONOMI REGIONAL

Pada Grafik 1.1. terlihat bahwa perkembangan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada Triwulan III tahun 2005 meningkat sebesar 5,84% (y-o-y). Peningkatan ini lebih tinggi bila dibandingkan laju pertumbuhan tahunan pada Triwulan III tahun 2004 sebesar 4,46% (y-o-y).

Bila dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, ekonomi Provinsi Bengkulu pada Triwulan III Tahun 2005 sedikit meningkat, hanya sebesar 0,50% (q-t-q). Rendahnya tingkat pertumbuhan ini karena menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan karena langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di beberapa daerah termasuk Bengkulu sehingga pasokan BBM mengalami gangguan yang mengakibatkan kenaikan harga. Disamping itu, naiknya harga barang yang disebabkan antisipasi penjual terhadap kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005 turut memperlemah daya beli masyarakat.

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB (y-o-y) Provinsi Bengkulu (harga konstan 1993)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

1.1. PDRB Sisi Permintaan

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian nasional, perputaran perekonomian Provinsi Bengkulu lebih digerakkan oleh tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi yang berarti peningkatan permintaan barang dan jasa selanjutnya mendorong peningkatan produksi sektor riil dan jasa karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*) pada akhirnya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.1. PDRB Berdasarkan Jenis Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

juta rupiah kecuali dinyatakan lain

Jenis Penggunaan	Q-II 2005		Q-III 2005		Pertumbuhan
	Nilai	Proporsi	Nilai	Proporsi	
I. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.375.339	63,98%	1.488.640	65,48%	8,24%
2. Konsumsi Lembaga Swasta	37.475	1,74%	38.183	1,68%	1,89%
3. Konsumsi Pemerintah	389.745	18,12%	418.860	18,42%	7,47%
4. Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	301.874	14,04%	312.456	13,74%	3,51%
5. Perubahan stok	16.934	0,79%	18.302	0,80%	8,08%
6. Ekspor	689.823	32,09%	708.965	31,18%	2,77%
7. Impor	(661.567)	(30,78%)	(711.853)	(31,31%)	7,60%
PDRB	2.149.623	100%	2.273.553	100%	5,77%
II. Atas Dasar Harga Konstan					
1. Konsumsi Rumah Tangga	348.325	63,11%	349.205	62,96%	0,25%
2. Konsumsi Lembaga Swasta	15.236	2,76%	15.298	2,76%	0,41%
3. Konsumsi Pemerintah	111.982	20,29%	115.156	20,76%	2,83%
4. Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	63.393	11,49%	64.218	11,58%	1,30%
5. Perubahan stok	3.794	0,69%	3.809	0,69%	0,40%
6. Ekspor	131.589	23,84%	132.012	23,80%	0,32%
7. Impor	(122.404)	(22,18%)	(125.027)	(22,54%)	2,14%
PDRB	551.915	100%	554.671	100%	0,50%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Kondisi ini perlu disikapi secara hati-hati, karena walaupun mampu menggerakkan sektor usaha yang ada (menciptakan nilai tambah PDRB sektoral), kenaikan tingkat konsumsi yang berlebihan tanpa diimbangi oleh peningkatan produksi dapat mengakibatkan kenaikan harga.

Disamping itu, kenaikan tingkat konsumsi yang berlebihan juga akan mendorong lalu lintas barang masuk ke Provinsi Bengkulu dari luar provinsi/daerah lain sehingga nilai tambah ekonomis akan dinikmati daerah lain.

1.1.1. Konsumsi Daerah

Pada Triwulan III tahun 2005 perekonomian Bengkulu masih didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (62,96%), lembaga swasta (2,76%) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (20,76%; Tabel 1.1.).

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan cenderung stagnan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,25% dan 2,83%. Sedangkan atas dasar harga berlaku, konsumsi rumah tangga (8,24%) dan konsumsi pemerintah meningkat tajam (7,47%). Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya harga barang dan jasa terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada awal bulan Oktober 2005.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, proporsi konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB cenderung meningkat yaitu dari 63,98% pada Triwulan II tahun 2005 menjadi 65,48% pada Triwulan III tahun 2005. Proporsi konsumsi pemerintah juga sedikit meningkat yaitu dari 18,12% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 18,42% pada triwulan ini.

1.1.2. Investasi Regional

Investasi di Bengkulu terus tumbuh positif walau berjalan sangat lambat. Pada Triwulan III tahun 2005 pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang mencerminkan tingkat investasi tumbuh positif sebesar 1,30% (q-t-q; Tabel 1.1.). Porsi kegiatan investasi dalam pembentukan PDRB juga masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 11,58% pada triwulan laporan sehingga belum dapat memberi dorongan yang signifikan pada perekonomian regional.

Tabel 1.2. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi Bengkulu Tahun 1997 – 2005

	Rencana Investasi		Realisasi Investasi	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
1997				
- Jumlah proyek	7	-	1	-
- Modal	Rp628,5 miliar	-	Rp34,5 miliar	-
- Tenaga kerja (orang)	20.262	-	1.257	-
1998				
- Jumlah proyek	1	5	-	-
- Modal	Rp4 miliar	US\$37,7 juta	-	-
- Tenaga kerja (orang)	137	7.532	-	-
1999				
- Jumlah proyek	2	1	1	-
- Modal	Rp130,9 miliar	US\$18,4 juta	Rp52,5 miliar	-
- Tenaga kerja (orang)	517	5.840	284	-
2000				
- Jumlah proyek	3	-	-	-
- Modal	Rp116,5 miliar	US\$0,2 juta	-	-
- Tenaga kerja (orang)	3.831	1.820	-	-

	Rencana Investasi		Realisasi Investasi	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2001				
- Jumlah proyek	-	1	-	2
- Modal	-	US\$1,9 juta	-	US\$13,2 juta
- Tenaga kerja (orang)	-	74	-	1.,125
2002				
- Jumlah proyek	1	-	-	-
- Modal	Rp55,3 miliar	-	-	-
- Tenaga kerja (orang)	108	-	-	-
2003				
- Jumlah proyek	1	-	-	-
- Modal	Rp81,9 miliar	-	-	-
- Tenaga kerja (orang)	690	-	-	-
2004				
- Jumlah proyek	2	1	-	-
- Modal	Rp104,1 miliar	US\$1,4 juta	-	-
- Tenaga kerja (orang)	689	48	-	-
2005				
- Jumlah proyek	1	1	-	-
- Modal	Rp142 miliar	US\$0,9 juta	-	-
- Tenaga kerja (orang)	127	47	-	-

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, minat investor untuk menanamkan investasinya di Bengkulu tampak cukup besar. Hampir setiap tahun terdapat rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), meskipun rencana investasi sempat nihil sejak tahun 2002, namun pada tahun 2004 dan 2005 ini, investor asing mulai menunjukkan kembali minatnya kepada Bengkulu.

Pada tahun 2005, rencana investasi PMDN sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp142 miliar dan rencana investasi PMA juga sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi US\$900 ribu. Namun demikian pada tahun 2005 sampai dengan Triwulan III tahun 2005, tidak ada realisasi investasi baik PMDN maupun PMA di Provinsi Bengkulu.

Investasi PMDN di Bengkulu terakhir dilakukan pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya 1 (satu) Izin Usaha Tetap (IUT) dengan nilai investasi sebesar Rp34,5 miliar dan tahun 1999 dimana 1 (satu) IUT dikeluarkan untuk investasi sebesar Rp52,5 miliar. Sedangkan untuk PMA, realisasi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 hanya terjadi pada tahun 2001 dimana dikeluarkan 2 IUT dengan investasi sebesar US\$13,2 juta.

Melihat potensi yang ada di Bengkulu, sebenarnya investor cukup tertarik untuk menanamkan investasinya di provinsi ini, sehingga pada

tiap-tiap tahun investor baik PMDN atau PMA, tidak pernah absen membuat rencana investasi.

Namun dari Tabel 1.2. terlihat bahwa hanya sedikit rencana investasi yang diikuti oleh realisasi investasi. Tampaknya investor mendapatkan hambatan sehingga mereka memutuskan untuk membatalkan rencana investasi di Bengkulu.

Rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan rencana investasi tersebut hendaknya mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah. Kajian lebih lanjut mengenai hal-hal yang menyebabkan mundurnya rencana investor untuk menanamkan modalnya di Bengkulu harus segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan yang lebih penting lagi, melakukan upaya nyata guna mengurangi hambatan-hambatan yang dialami oleh investor dalam menanamkan modalnya di Bengkulu.

1.1.3. Ekspor dan Impor Regional

Ekspor dan impor regional dalam pembentukan PDRB merupakan kegiatan antar wilayah maupun lintas barang dan jasa dari dan ke Provinsi Bengkulu. Pada triwulan laporan kegiatan ekspor dan impor regional mengalami net impor (arus barang dan jasa masuk lebih besar dibanding arus barang dan jasa yang keluar) sebesar Rp2.888 juta. Sementara pada triwulan sebelumnya Provinsi Bengkulu masih mengalami net ekspor sebesar Rp28.256 juta (Tabel 1.3.). Hal ini menandakan bahwa kebutuhan barang di Provinsi Bengkulu masih dipenuhi dari luar provinsi.

Tabel 1.3. Perkembangan Ekspor dan Impor Regional dalam pembentukan PDRB menurut Harga Berlaku Provinsi Bengkulu

juta rupiah

	2004				2005		
	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3
Ekspor Regional	566.892	566.609	649.350	682.035	669.723	689.823	708.965
Impor Regional	527.386	530.698	621.135	636.502	701.296	661.567	711.853
Net Ekspor (Impor)	39.506	35.911	28.215	45.533	(31.573)	28.256	(2.888)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

Sedangkan berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencatat kegiatan perdagangan lintas negara dari dan ke Provinsi Bengkulu, pada Triwulan III (sampai dengan bulan Agustus) tahun 2005, ekspor barang dari Provinsi Bengkulu menurut mata dagangan diklasifikasikan berdasarkan *harmonized system* (dua digit) tercatat sebesar US\$21.408 ribu. Sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, di Provinsi

Bengkulu belum terdapat kegiatan impor barang dari luar negeri (Tabel 1.4.).

Tabel 1.4. Perkembangan Ekspor Barang-Barang Non-Migas Utama di Provinsi Bengkulu

nilai dalam ribu dollar, volume dalam ton

Mata Dagangan	Ket.	2004		2005			Proporsi
		Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3*	
Lemak/minyak hewan/nabati	Nilai	4.427	5.223	3.391	2.651	6.859	32,04%
	Volume	9.883	13.681	9.500	7.500	19.003	
Kokoa dan produk kokoa	Nilai	516	810	600	1.346	317	1,48%
	Volume	350	538	375	850	225	
Bahan bakar mineral	Nilai	3.048	2.704	4.208	5.965	3.687	17,22%
	Volume	132.504	96.149	141.964	176.601	113.155	
Karet dan barang dari karet	Nilai	13.312	9.263	14.479	17.768	10.537	49,22%
	Volume	12.466	8.904	13.063	15.456	8.777	
Benda-benda dari besi dan baja	Nilai	-	-	-	-	-	0,00%
	Volume	-	-	-	-	-	
Lainnya	Nilai	2	21	7	302	8	0,04%
	Volume	-	60	-	452	1	
Total	Nilai	21.305	18.021	22.685	28.032	21.408	100%
	Volume	155.203	119.332	164.902	200.859	141.161	

* Data sementara – sampai dengan bulan Agustus 2005

Sumber : Bagian PDIE Bank Indonesia

Kinerja ekspor Provinsi Bengkulu masih ditopang oleh sektor perkebunan. Ekspor Provinsi Bengkulu pada Triwulan III tahun 2005 sebagaimana Tabel 1.4. didominasi oleh karet sebesar \$10.537 ribu (49,22%) dan *crude palm oil* (lemak/minyak hewan/nabati) sebesar \$6.859 ribu (32,04%). Potensi ekspor juga terlihat pada mata dagangan kokoa dan produk kokoa yang terus mengalami peningkatan.

Bila dilihat dari negara pembeli, pada Triwulan III tahun 2005, Singapura masih merupakan negara dengan nilai pembelian terbesar diikuti dengan Belgia, Amerika Serikat dan Hongkong. (Tabel 1.5.).

Tabel 1.5. Perkembangan Ekspor Barang-Barang Non-Migas Utama Menurut Negara Pembeli di Provinsi Bengkulu

nilai dalam ribu dollar, volume dalam ton

Negara Pembeli	Ket.	2004		2004	2005		
		Q-3	Q-4		Q-1	Q-2	Q-3*
Amerika Serikat	Nilai	2.906	1.598	8.463	3.000	3.242	1.210
	Volume	2.781	1.595	8.004	2.836	2.901	1.033
Thailand	Nilai	302	512	1.890	628	1.184	111
	Volume	200	338	1.262	6.725	8.967	75
Singapura	Nilai	9.178	6.868	37.023	9.855	13.419	8.610
	Volume	8.705	6.648	36.080	8.857	11.662	7.167
Philipina	Nilai	743	324	2.112	804	-	106
	Volume	36.585	15.459	106.658	34.810	-	6.676

Negara Pembeli	Ket.	2004		2004	2005		
		Q-3	Q-4		Q-1	Q-2	Q-3*
Malaysia	Nilai	214	298	3.296	167	333	443
	Volume	150	200	43.216	100	200	8.194
Hongkong	Nilai	363	316	2.642	1.029	1.660	556
	Volume	15.191	7.933	112.807	21.229	40.381	15.457
Inggris	Nilai	178	76	602	99	53	136
	Volume	134	61	462	81	40	101
Jerman	Nilai	-	-	45	-	422	205
	Volume	-	-	37	-	1.040	7.059
Belgia	Nilai	5.477	5.902	21.479	4.401	3.190	7.328
	Volume	10.729	14.240	45.254	10.290	7.223	19.379
Lainnya	Nilai	1.944	2.127	7.459	2.702	4.529	2.703
	Volume	80.728	72.858	301.504	79.974	128.445	76.020
Total	Nilai	21.305	18.021	85.011	22.685	28.032	21.408
	Volume	155.203	119.332	655.284	164.902	200.859	141.161

* Data sementara – sampai dengan bulan Agustus 2005
Sumber : Bagian PDIE Bank Indonesia

1.2. PDRB Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, pertumbuhan PDRB triwulanan sebesar 0,50% tersebut disebabkan karena pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran (2,98%) dan sektor keuangan dan persewaan (1,91%) yang diikuti oleh penurunan sektor pertambangan dan penggalian (-2,76%) - Tabel 1.6.

Sementara itu pertumbuhan sektor pertanian sedikit meningkat (0,25%) dan karena sektor pertanian masih mendominasi pada pembentukan PDRB (32,88%; Tabel 1.7.), maka secara keseluruhan pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu hanya mengalami sedikit peningkatan.

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu (q-t-q) menurut Sektor

Lapangan Usaha	Trw-IV 2004	Trw-I 2005	Trw-II 2005	Trw-III 2005
1. Pertanian	(4,85)	12,49	(2,80)	0,25
2. Pertambangan dan Penggalian	6,74	6,94	1,29	(2,76)
3. Industri Pengolahan	8,17	(5,56)	0,13	(1,26)
4. Listrik, Air dan Gas	5,00	0,37	0,42	1,65
5. Bangunan	3,97	0,98	0,48	0,58
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,15	(3,39)	2,50	2,98
7. Angkutan dan Komunikasi	2,94	2,03	0,21	(1,21)
8. Keuangan dan Persewaan	3,87	1,82	0,44	1,91
9. Jasa-jasa	2,23	3,07	2,55	0,63
PDRB	0,56	4,26	0,01	0,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi (2,98%) diikuti oleh sektor keuangan dan persewaan (1,91%) dan sektor listrik, air dan gas (1,65%).

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan terbesar (2,76%). Sebenarnya sektor ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, namun sampai saat ini pendaagunaannya masih belum optimal karena belum banyak investor yang menanamkan modalnya pada sektor ini.

Tabel 1.7. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Lapangan Usaha Provinsi Bengkulu

juta rupiah kecuali dinyatakan lain

Lapangan Usaha	Q1-2005		Q2-2005		Q3-2005	
	Nilai	Nilai	Nilai	%	Nilai	%
1. Pertanian	187.155	181.914	181.914	33,91	182.376	32,88
2. Pertambangan dan Penggalian	17.504	17.730	17.730	3,17	17.240	3,11
3. Industri Pengolahan	25.822	25.855	25.855	4,68	25.529	4,60
4. Listrik, Gas dan Air	6.213	6.239	6.239	1,13	6.342	1,14
5. Bangunan	15.095	15.167	15.167	2,74	15.255	2,75
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	88.775	90.990	90.990	16,09	93.698	16,89
7. Pengangkutan dan Komunikasi	84.012	84.190	84.190	15,22	83.168	14,99
8. Keuangan dan Persewaan	32.452	32.596	32.596	5,88	33.218	5,99
9. Jasa – jasa	94.815	97.234	97.234	17,18	97.845	17,64
PDRB	551.843	551.915	551.915	100,00	554.671	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Dari data PDRB Provinsi Bengkulu menurut sektor (Tabel 1.7.) terlihat bahwa sampai saat ini perekonomian Bengkulu masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti pertanian tanaman pangan, sayuran, perkebunan, dan perikanan.

1.3. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu yang berusia diatas lima belas tahun keatas sebesar 2,03% yaitu dari 1.045.872 orang menjadi 1.066.963 orang. Dari 1.066.963 orang tersebut, sebanyak 805.651 (75,51%) orang termasuk dalam angkatan kerja sedangkan sisanya (24,49%) bukan angkatan kerja (Tabel 1.8).

Tabel 1.8. Penduduk Provinsi Bengkulu Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Tahun 2005

jiwa kecuali ditentukan lain

Kegiatan	2004	2005	Pert.	
			Orang	%
Angkatan kerja	768.348	805.651	37.303	4,85%
- Bekerja	720.036	756.142	36.106	5,01%
- Pengangguran	48.312	49.509	1.197	2,48%
Bukan angkatan kerja	277.524	261.312	(16.212)	(5,84%)
Penduduk berumur 15+	1.045.872	1.066.963	21.091	2,03%

Sumber : Sakernas 2005; diolah

1.3.1. Pekerja

Pada Tabel 1.9. terlihat bahwa lebih dari 70% penduduk Bengkulu bekerja di sektor pertanian, terutama di sub-sektor pertanian, tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura yang menyerap 65,86% jumlah pekerja Bengkulu serta sub-sektor perikanan dengan proporsi sebesar 3,72%. Ditempat kedua, penduduk Bengkulu paling banyak bekerja di sektor perdagangan (13,26%) dengan sub-sektor terbesar adalah perdagangan eceran (10,67%) dan sub-sektor perdagangan besar (1,72%).

Tabel 1.9. Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Sub-Sektor Tahun 2005

jiwa kecuali ditentukan lain

Lapangan Usaha	2004	2005	Proporsi	Pert.
Pertanian	492.480	533.779	70,59%	8,39%
Tanaman pangan dan perkebunan		498.023	65,86%	
Peternakan		2.645	0,35%	
Kombinasi pertanian dan peternakan		312	0,04%	
Jasa pertanian dan peternakan		3.365	0,45%	
Perburuan/penangkapan satwa liar		-	-	
Kehutanan		1.308	0,17%	
Perikanan		28.126	3,72%	
Pertambangan	2.550	8.005	1,06%	213,92%
Batubara		649	0,09%	
Minyak dan gas bumi		-	-	
Bijih logam		5.011	0,66%	
Penggalian		2.345	0,31%	
Penggalian garam		-	-	
Industri	12.132	14.972	1,98%	23,41%
Makanan & tembakau		7.170	0,95%	
Tekstil, pakaian jadi dan kulit		640	0,08%	
Barang dari kayu		2.815	0,37%	
Kertas		356	0,05%	
Kimia		2.968	0,39%	
Barang galian bukan logam		378	0,05%	
Logam dasar		-	-	
Barang dari logam dan mesin		267	0,04%	
Industri pengolahan lainnya		378	0,05%	
Listrik, gas dan air	1.080	1.213	0,16%	12,31%
Listrik		1.213	0,16%	
Gas & uap		-	-	
Penyediaan & penyaluran air		-	-	
Bangunan	21.276	13.327	1,76%	(37,36%)
Bangunan sipil		13.327	1,76%	
Perdagangan	86.472	100.233	13,26%	15,91%
Perdagangan besar		13.002	1,72%	
Perdagangan eceran		80.651	10,67%	
Rumah makan dan minum		906	0,12%	
Hotel dan penginapan		-	-	
Perdagangan kendaraan bermotor		5.309	0,70%	
Perdagangan ekspor		-	-	
Perdagangan impor		365	0,05%	

Lapangan Usaha	2004	2005	Proporsi	Pert.
Angkutan	17.928	19.755	2,61%	10,19%
Angkutan darat		16.499	2,18%	
Angkutan air		-	-	
Angkutan udara		267	0,04%	
Penggudangan dan jasa angkutan		2.989	0,40%	
Komunikasi		-	-	
Keuangan	3.960	3.200	0,42%	(19,19%)
Lembaga keuangan		433	0,06%	
Asuransi		457	0,06%	
Usaha persewaan		2.310	0,31%	
Jasa	82.188	61.658	8,15%	(24,98%)
Pemerintahan & keamanan		22.973	3,04%	
Jasa kebersihan dan sejenisnya		-	-	
Jasa sosial dan kemasyarakatan		27.738	3,67%	
Jasa hiburan dan kebudayaan		2.596	0,34%	
Jasa perorangan dan RT		4.643	0,61%	
Badan internasional & ekstrateritorial		-	-	
Jasa lainnya		3.708	0,49%	
Penduduk bekerja	720.036	756.142	100,00%	5,01%

Sumber : Sakernas 2005; diolah

1.3.2. Pengangguran

Pada tahun 2005, pengangguran di Bengkulu berjumlah 49.509 orang dimana 27.102 orang berasal dari desa dan 22.407 orang berada di kota. Berdasarkan pendidikan, jumlah pengangguran terbanyak berpendidikan terakhir SLTA Umum/SMU (17.307 orang) dan SLTP Umum/SMP (12.105 orang). Namun yang cukup mencolok adalah masih tingginya jumlah pengangguran yang berpendidikan akhir universitas (3.237 orang).

Tabel 1.10. Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja menurut Pendidikan Tahun 2005

Pendidikan Tertinggi	Kota	Desa	Jumlah
Tidak sekolah	-	415	415
Tidak tamat Sekolah Dasar	-	2.197	2.197
Sekolah Dasar	1.022	5.150	6.172
SLTP Umum/SMP	4.370	7.735	12.105
SLTP kejuruan	-	-	-
SLTA Umum/SMU	7.425	9.882	17.307
SLTA kejuruan/SMK	4.405	1.308	5.713
Diploma I/II	1.082	415	1.497
Akademi/Diploma III	866	-	866
Universitas	3.237	-	3.237
Penduduk tidak bekerja	22.407	27.102	49.509

Sumber : Sakernas 2005; diolah

1.3.3. Partisipasi dan Produktivitas Angkatan Kerja

Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 73,5% pada tahun 2004 menjadi 75,5% pada tahun 2005. Walaupun menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang bekerja semakin tinggi tetapi peningkatan TPAK ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena peningkatan tersebut bisa disebabkan karena adanya penduduk usia kerja yang putus sekolah dan masuk ke angkatan kerja.

Tabel 1.11. TPAK dan TPT Provinsi Bengkulu Tahun 2005

jiwa kecuali ditentukan lain

	2004	2005
Angkatan kerja	768.348	805.651
Penduduk usia kerja (15 tahun keatas)	1.045.872	1.066.963
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,5%	75,5%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (TPT)	6,3%	6,1%

Sumber : Sakernas 2005; diolah

Sementara itu perbandingan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah yang tercermin pada Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (TPT) menurun dari 6,3% pada tahun 2004 menjadi 6,1% pada tahun 2005.

Penambahan tenaga kerja baru ternyata tidak memberikan sumbangan kepada PDRB dengan porsi yang sama dengan yang diberikan oleh tenaga kerja sebelumnya. Penurunan produktivitas ini disebabkan karena tenaga kerja baru bukan merupakan tenaga kerja terampil atau tenaga kerja ahli dan karena tenaga kerja baru termasuk dalam pengangguran tak kentara.

1.3.4. Upah Minimum Regional

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok pekerja lapisan paling bawah di setiap perusahaan agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga kebutuhan hidup minimum.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.400 tahun 2004 tanggal 23 November 2004, Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp430.000 (Tabel 1.12.).

Tabel 1.12. Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2004 dan 2005

rupiah kecuali dinyatakan lain

	2004	2005	Pert.
Upah Minimum Provinsi	363.000	430.000	67.000
Kebutuhan Hidup Minimum	505.000	480.000	(25.000)
UMP/KHM	71,88%	89,48%	17,60%

Sumber : Direktorat Pengupahan, Jamsos dan Kesejahteraan

UMP Provinsi Bengkulu tahun 2006 diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi sebesar Rp550.000 per bulan meningkat sebesar 27,91% dibanding UMP tahun 2005. Jika UMP ini disetujui maka UMP Provinsi Bengkulu akan lebih tinggi dari gaji Pegawai negeri Sipil (PNS) golongan rendah, meski gaji PNS telah dinaikkan sebesar 15% sesuai usulan.

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR MUSI, BENGKULU Siap Beroperasi Penuh

Kondisi kelistrikan di Sumatra masih sarat dengan masalah. Mulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang makin besar sampai *byar-pet* yang masih sering terjadi. Satu-satunya solusi untuk mengatasi kurangnya pasokan daya listrik adalah dengan membangun sumber energi baru.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi berlokasi di desa Ujanmas Atas, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu sekitar 30 kilometer arah timur Kota Bengkulu. PLTA ini dibangun dengan tipe *run of river* yakni pemanfaatan aliran sungai tanpa menggunakan waduk dan bendungan. Air Sungai Musi dialirkan melalui terowongan sepanjang 7,1 kilometer kemudian diterjunkan dengan ketinggian 404,4 meter untuk memutar turbin dan dibuang ke Sungai Simpang Aur.

Kapasitas PLTA Musi sebesar 3 x 70 MW dan dapat memproduksi energi mencapai 1.140 GWH per tahun. PLTA yang menelan dana 35,3 juta dolar AS ini merupakan yang terbesar pertama di wilayah Sumatra bagian selatan. PLTA Musi bersama dengan PLTA Besai (Lampung) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Sumatra.

Pembangunan PLTA sudah dimulai sejak akhir tahun 1994 dan diperkirakan siap beroperasi antara tahun 2000-2001, namun karena krisis moneter tahun 1997, proyek yang dibiayai oleh pinjaman *Asian Development Bank* dan dana Pemerintah Indonesia ini tertunda pelaksanaannya. Setelah itu pembangunan PLTA ini dilanjutkan dan PLTA Musi diperkirakan akan beroperasi maksimal pada pertengahan April 2006.

Namun demikian, degradasi lingkungan yang terjadi akibat perambahan dan penebangan kayu ilegal di kawasan hutan lindung register V, Bukit Daun yang merupakan salah satu daerah tangkapan air menyebabkan penurunan debit air Sungai Musi di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Menyusutnya debit air ini menyebabkan ketiga turbin tidak dapat dioperasikan secara optimal.

BAB
2

INFLASI REGIONAL

2.1. Kajian Umum

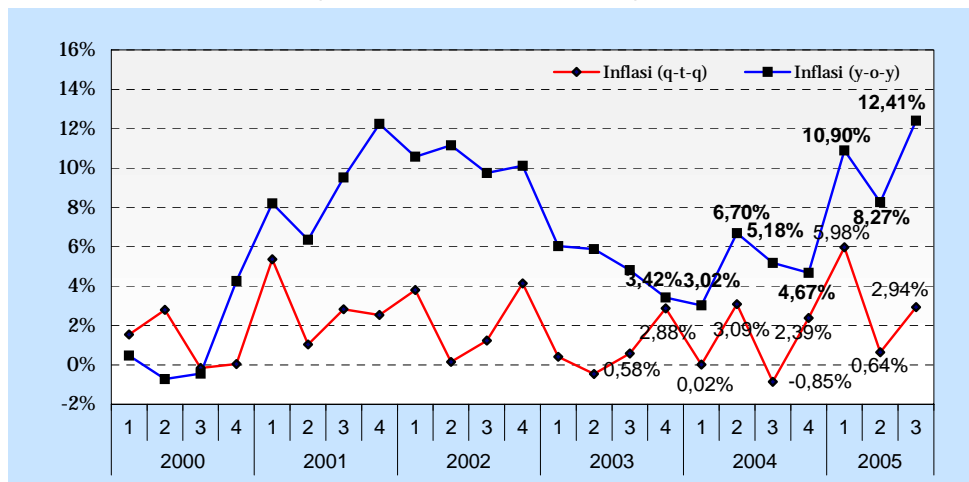
Dalam perhitungan inflasi di Provinsi Bengkulu, sampel survei dilakukan di Kota Bengkulu yang dianggap dapat mewakili keseluruhan Provinsi Bengkulu.

Perkembangan tingkat inflasi Kota Bengkulu (Grafik 2.1. dan Tabel 2.1.) yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) 2005 memperlihatkan tren meningkat sejak Triwulan I tahun 2004.

Pada Triwulan III tahun 2005, inflasi Kota Bengkulu sebesar 2,94% (q-t-q) bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meningkat sebesar 2,30%. Inflasi tahunan kembali mencapai *double digit*, setelah sempat mereda pada triwulan lalu. Inflasi tahunan sebesar 12,41% (y-o-y) meningkat bila dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2005 sebesar 8,27%.

Secara kumulatif, inflasi tahun 2005 sampai dengan Triwulan III sudah mencapai 9,79% dan diperkirakan pada akhir tahun 2005, inflasi Kota Bengkulu bisa mencapai diatas 12%.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi IHK Kota Bengkulu



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

2.2. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Dari sisi kelompok barang dan jasa, inflasi terjadi pada semua kelompok kecuali kelompok pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga diikuti oleh kelompok bahan makanan masing-masing dengan inflasi sebesar 6,11% dan 5,34% (Tabel 2.1). Sedangkan deflasi terjadi pada kelompok pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami penurunan sebesar -0,09% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Kelompok Barang/jasa Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)

persen

Kelompok Barang/Jasa	Trw II-2005			Trw III-2005		
	IHK	Inflasi	Sumb	IHK	Inflasi	Sumb
Bahan makanan	114,59	(1,72)	(0,51)	120,72	5,34	1,55
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	121,60	1,40	0,28	125,38	3,11	0,62
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	127,05	2,37	0,50	128,50	1,14	0,25
Sandang	113,84	1,81	0,11	116,84	2,64	0,16
Kesehatan	113,96	2,13	0,09	115,11	1,01	0,04
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	115,00	0,70	0,04	122,03	6,11	0,32
Pengangkutan, Komunikasi dan Jasa Keuangan	133,58	1,01	0,14	133,47	(0,09)	(0,01)
Inflasi Umum	120,81	-	0,64	124,36		2,94
Inflasi (y-t-d)			6,66			9,79
Inflasi (y-o-y)			8,27			12,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Sumbangan terbesar terhadap inflasi Bengkulu diberikan oleh kelompok bahan makanan yaitu sebesar 1,55%, diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan sumbangan sebesar 0,62% (Tabel 2.1.).

Masyarakat sudah menduga bahwa pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar awal bulan September 2005. Kenaikan harga BBM ini pada akhirnya akan meningkatkan harga barang-barang dan jasa dalam waktu dekat. Perkiraan kenaikan harga barang dan jasa memicu konsumsi masyarakat yang berusaha untuk berbelanja sebelum harga-harga terlanjur meningkat.

Namun karena daya beli masyarakat yang menurun, tingkat konsumsi masyarakat Bengkulu pada Triwulan III tahun 2005 hanya mengalami sedikit peningkatan (lihat Bab I Kondisi Makroekonomi Regional). Penghasilan saat ini

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kenaikan harga menyebabkan penurunan konsumsi.

2.2.1. Pendorong Inflasi

Secara umum, inflasi Kota Bengkulu lebih disebabkan karenaantisipasi masyarakat akan kenaikan BBM yang akan diumumkan oleh pemerintah pada awal Triwulan IV tahun 2005. Fenomena ini juga terjadi di seluruh Indonesia.

Sumbangan inflasi Kota Bengkulu terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok bahan makanan dengan sumbangan sebesar 1,55% disusul oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan sumbangan sebesar 0,62%.

Inflasi pada kelompok bahan makanan (5,34%), dengan sumbangan pada inflasi umum sebesar 1,55%, didorong oleh kenaikan harga pada subkelompok bumbu-bumbuan (16,23%), subkelompok kacang-kacangan (15,17%) dan subkelompok ikan segar (13,05%) – Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)

persen

Subkelompok	2004		2005		
	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3
Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya	2,35	6,53	18,37	(9,00)	6,83
Daging dan hasil-hasilnya	(14,59)	9,34	1,64	3,94	(4,63)
Ikan segar	12,98	(10,16)	3,63	1,90	13,05
Ikan diawetkan	(0,32)	(1,37)	6,38	(0,87)	0,01
Telur, susu dan hasil-hasilnya	(3,05)	7,10	(0,56)	3,36	2,48
Sayur-sayuran	(13,25)	21,98	19,51	(8,28)	(6,60)
Kacang-kacangan	(1,79)	3,54	0,55	0,34	15,17
Buah-buahan	(2,39)	6,91	(2,72)	(2,58)	6,07
Bumbu-bumbuan	(34,28)	13,90	(3,15)	10,75	16,23
Lemak dan minyak	(2,55)	0,38	0,97	1,02	1,64
Bahan Makanan lainnya	0,19	3,11	(0,65)	0,90	0,00
Bahan makanan	(5,26)	4,99	7,34	(1,72)	5,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

Pada kelompok ini, komoditas yang dominan dalam memberikan sumbangan inflasi adalah beras (0,52%), cabe merah (0,49%) dan ikan dencis (0,21%) masing-masing dengan inflasi sebesar 7,52%, 39,85% dan 23,62%– Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Sumbangan 10 Komoditas dengan Sumbangan Inflasi dan Deflasi Terbesar terhadap Inflasi Kota Bengkulu

persen

No.	Komoditas	Inflasi	Sumb.	Komoditas	Deflasi	Sumb.
1.	Beras	7,52	0,52	Daging ayam ras	-10,39	-0,21
2.	Cabe Merah	39,85	0,49	Bawang merah	-11,60	-0,07
3.	Ikan Dencis	23,62	0,21	Jengkol	-17,95	-0,06
4.	Rokok kretek filter	5,56	0,21	Kacang panjang	-23,64	-0,05
5.	Rokok kretek	7,06	0,18	Bayam	-9,57	-0,04
6.	Emas perhiasan	15,98	0,14	Kol putih/kubis	-22,60	-0,03
7.	Pendidikan Akademi/PT	11,75	0,14	Buncis	-23,21	-0,02
8.	Sewa rumah	3,52	0,13	Bawang putih	-5,25	-0,02
9.	Tempe	20,00	0,13	Sawi hijau	-15,79	-0,02
10.	Pendidikan SLTA	20,16	0,11	Udang basah	-4,35	-0,01
Total sumbangan			2,26	Total sumbangan		-0,53
Komoditas lain			0,11	Komoditas lain		2,90
Inflasi Umum			2,37	Inflasi Umum		2,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

Sedangkan inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (3,11%), dengan sumbangan pada inflasi umum sebesar 0,62%, didorong oleh kenaikan harga pada seluruh subkelompok. Subkelompok tembakau dan minuman beralkohol mengalami peningkatan tertinggi (6,05%) diikuti oleh subkelompok minuman yang tidak beralkohol (3,41%) dan subkelompok makanan jadi (1,11%) – Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)

persen

Subkelompok	2004		2005		
	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3
Makanan jadi	2,55	0,58	4,15	2,35	1,11
Minuman yang tidak beralkohol	0,46	11,58	8,06	0,26	3,41
Tembakau dan minuman beralkohol	0,93	0,00	5,38	0,52	6,05
Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,69	2,03	5,20	1,40	3,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, komoditas yang dominan dalam memberikan sumbangan inflasi adalah rokok kretek filter (0,21%) dan rokok kretek (0,18%), masing-masing dengan inflasi sebesar 5,56% dan 7,06%.

2.2.2. Pendorong Deflasi

Pada Triwulan III Tahun 2005, deflasi hanya terjadi pada satu kelompok yaitu kelompok pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan

dengan deflasi sebesar -0,09% dan sumbangan sebesar -0,01% (Tabel 2.1.). Deflasi terutama dipicu oleh penurunan harga pada subkelompok pengangkutan (-0,12%), sedangkan subkelompok lainnya cenderung stabil – Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Inflasi Kelompok Pengangkutan, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kota Bengkulu (Triwulanan, q-t-q)

persen

Subkelompok	2004		2005		
	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3
Pengangkutan	(0,10)	1,08	25,23	1,17	(0,12)
Komunikasi dan pengiriman	(0,01)	0,28	0,00	0,00	0,00
Sarana dan penunjang pengangkutan	0,38	(0,17)	0,12	2,52	0,00
Jasa keuangan	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan	0,33	0,78	17,02	1,01	(0,09)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

Deflasi pada subkelompok pengangkutan disebabkan oleh turunnya harga angkutan udara (-7,61%) yang merupakan koreksi setelah peningkatan tinggi yang terjadi pada Triwulan II tahun 2005 sebesar 25,74%.

Namun demikian, deretan penyumbang deflasi terbesar masih didominasi oleh komoditas pada kelompok bahan makanan (Tabel 2.3.). Pada kelompok bahan makanan, harga pada subkelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi. Meskipun harga daging kerbau dan sapi mengalami kenaikan (9,18% dan 7,85%), namun turunnya harga daging ayam ras yang cukup tinggi (-10,39%) menyebabkan turunnya harga pada subkelompok ini.

Flu burung yang melanda Indonesia dan telah memakan korban jiwa menyebabkan turunnya permintaan dan konsumsi masyarakat akan daging ayam ras dan pada akhirnya menyebabkan turunnya harga daging ayam ras.

2.3. Inflasi 2005

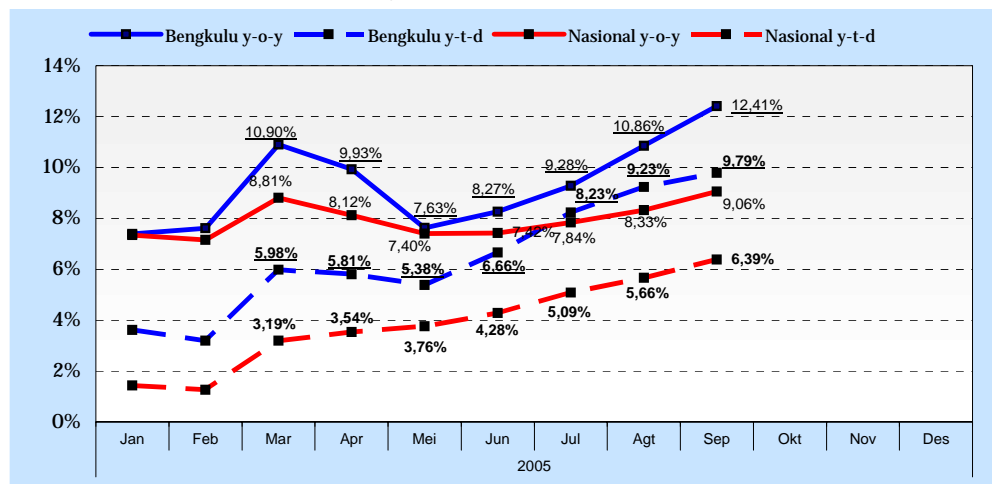
Bank Indonesia memperkirakan inflasi nasional bisa mencapai lebih dari 14%. Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Laju inflasi tingkat nasional pada Triwulan III tahun 2005 sebesar 6,39% (y-t-d) dan 9,06% (y-o-y) jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Bengkulu

sebesar 9,79% (y-t-d) dan 12,41% (y-o-y) sebagaimana tergambar pada Grafik 2.2.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga BI rate yang saat ini sebesar 10%. Peningkatan BI rate ini bertujuan untuk menjaga agar real *interest rate* tetap menarik.

Kondisi inflasi yang relatif tinggi ini sudah seyogyanya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak meskipun porsi sumbangan inflasi Kota Bengkulu terhadap inflasi nasional tidak terlalu besar.

Grafik 2.2. Realisasi dan Proyeksi Inflasi 2005



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; diolah

BAB 3

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

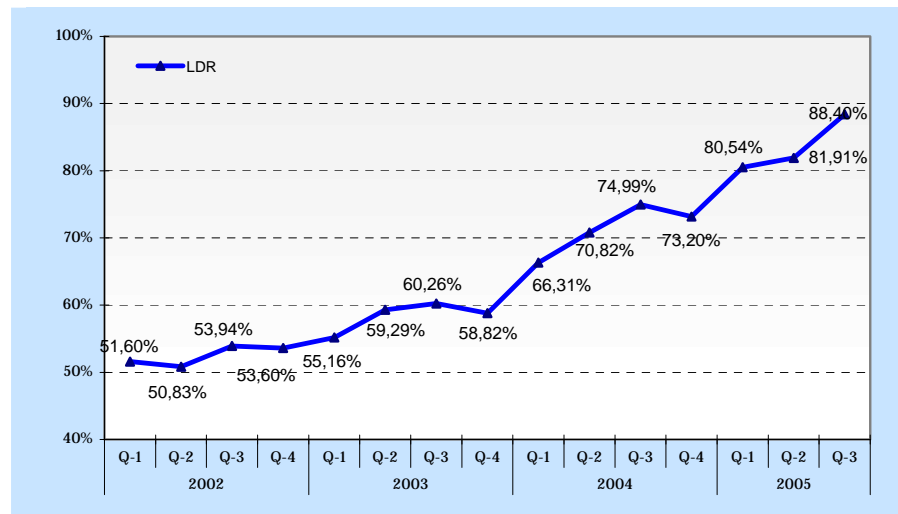
3.1. Perbankan

3.1.1. Gambaran Umum

Perkembangan fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang terus meningkat. *Loan to Deposits Ratio* (LDR) meningkat dari hanya sebesar 81,91% pada Triwulan II tahun 2005 menjadi sebesar 88,40% pada Triwulan III tahun 2005 (Grafik 3.1.). Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terjadi peningkatan LDR sebesar 6,49%.

Pertumbuhan kredit dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan dana yang terhimpun di perbankan Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan mendorong peningkatan LDR.

Grafik 3.1. Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perbankan Provinsi Bengkulu

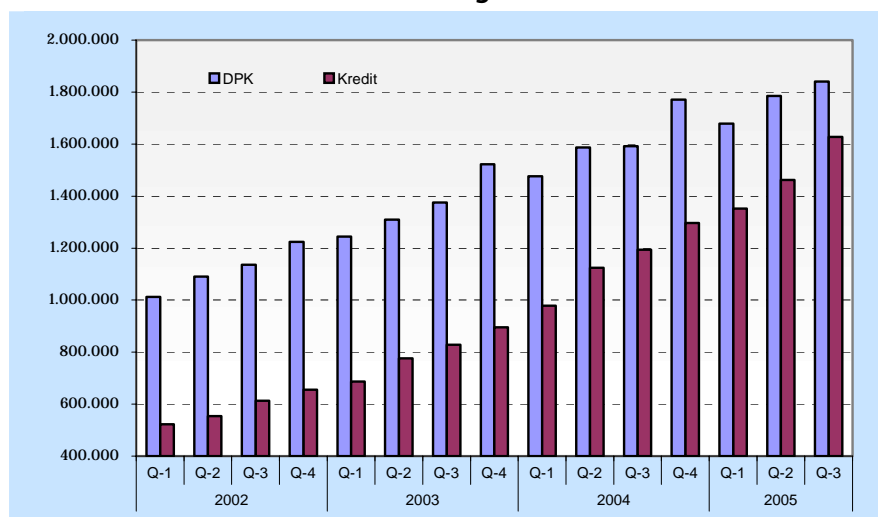


Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan Provinsi Bengkulu naik sebesar 3,16% sedangkan total kredit yang disalurkan meningkat 11,34%.

Yang menggembirakan adalah peningkatan kredit juga diikuti oleh peningkatan kualitas kredit yang disalurkan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari *non-performing loan* (NPL) yang menurun dari sebesar 2,73% pada Triwulan II tahun 2005 menjadi sebesar 2,41% pada Triwulan III tahun 2005.

Grafik 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Kredit Perbankan Provinsi Bengkulu



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

3.1.2. Perkembangan Bank Umum

a. Kelembagaan

Pada Triwulan III tahun 2005 jumlah kantor cabang bank yang beroperasi di wilayah kerja Bank Indonesia Bengkulu bertambah sebanyak 1 bank dengan diizinkan perubahan status Bank Tabungan Negara dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang.

Bank Tabungan Negara merupakan bank umum milik pemerintah yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri terkait. Bank ini didirikan tahun 1897 dan berkantor pusat di Jakarta.

Dengan demikian jumlah bank yang beroperasi di Provinsi Bengkulu sebanyak 10 bank yang terdiri dari 1 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 4 Bank Pemerintah dan 5 Bank Swasta dengan 1 diantaranya merupakan bank syariah.

Tabel 3.1. Jaringan Kantor Pelayanan Bank Provinsi Bengkulu

	KP	KC	KCP	KK	Unit	PP	ATM
Kota Bengkulu	1	9	7	2	9	2	31
Bengkulu Selatan	-	2	2	-	6		2
Bengkulu Utara	-	2	5	-	8	1	2
Rejang Lebong	-	2	7	-	5	1	6
Lebong	-	-	1	-	2	-	-
Kepahiang	-	-	2	-	2	-	2
Kaur	-	-	1	-	3	-	-
Seluma	-	-	1	-	2	1	-
Muko-Muko	-	-	3	-	2	1	-
Jumlah	1	15	29	2	39	7	43

KP : Kantor Pusat

KC : Kantor Cabang

KCP : Kantor Cabang Pembantu

KK : Kantor Kas

Sumber : Bank Indonesia Bengkulu

Unit : BRI Unit

PP : *Payment Point*

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

Jaringan kantor pelayanan bank Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 94 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang, 29 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas, 39 BRI Unit dan 7 *payment point* serta didukung oleh 43 ATM.

b. Perkembangan Aktiva

Tabel 3.2. Perkembangan Aktiva Perbankan Provinsi Bengkulu

Kelompok Bank	2005			Pangsa	Pert .Trw. lalu
	Q-1	Q-2	Q-3		
Bank Pemerintah	1.640.634	1.672.683	1.781.787	79,38%	6,52%
Bank Swasta	412.877	430.222	462.975	20,62%	7,61%
Bank Umum (Total)	2.053.511	2.102.905	2.244.762	100%	6,75%

juta rupiah

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

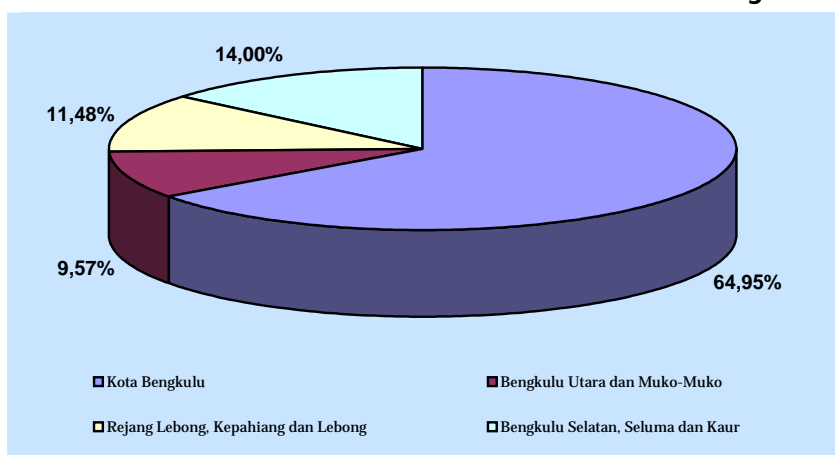
Total aktiva bank umum Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan meningkat 6,75% dibanding triwulan sebelumnya yaitu dari Rp2.102.095 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi Rp2.244.762 juta (Tabel 3.2.).

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan aktiva pada kelompok Bank Swasta tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada Bank Pemerintah yaitu dengan peningkatan masing-masing sebesar 7,61% dan 6,75%. Secara nominal, aktiva kelompok Bank Pemerintah (termasuk BPD) masih mendominasi yaitu sebesar 79,38% dari total aktiva bank umum di Provinsi Bengkulu.

Peningkatan aktiva bank umum Provinsi Bengkulu disebabkan karena meningkatnya jumlah dana yang dihimpun serta peningkatan kredit yang diberikan.

Dilihat dari wilayah penyebarannya (Grafik 3.3.), aktiva bank umum masih terpusat di wilayah Kota Bengkulu yang pada triwulan laporan memiliki porsi sebesar 64,95% diikuti Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur (14,00%), Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong (11,48%) dan Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko (9,57%).

Grafik 3.3. Distribusi Aktiva Bank Umum di Provinsi Bengkulu



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

c. Perkembangan Dana Masyarakat

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan pada triwulan laporan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito sedangkan giro mengalami sedikit penurunan.

Seperti yang terjadi pada Triwulan II tahun 2005, peningkatan terbesar terjadi pada tabungan (5,45%) yaitu dari Rp930.663 juta pada triwulan sebelumnya menjadi Rp981.353 juta pada triwulan laporan, diikuti oleh deposito dengan peningkatan sebesar 2,69%. Disisi lain, giro mengalami sedikit penurunan sebesar -0,73% yaitu dari Rp506.058 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi Rp502.347 juta pada Triwulan III tahun 2005 (Tabel 3.3.).

Jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat terutama deposito diperkirakan akan meningkat pada Triwulan IV tahun 2005 seiring dengan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tabel 3.3. Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Bengkulu

Keterangan	2005			Pert. q-t-q
	Q-1	Q-2	Q-3	
Bank Umum (Total)	1.678.869	1.784.428	1.840.776	3,16%
Giro	447.163	506.058	502.347	(0,73%)
Tabungan	887.739	930.663	981.353	5,45%
Deposito	343.967	347.707	357.076	2,69%
Bank Pemerintah	1.313.250	1.398.475	1.436.116	2,69%
Giro	411.649	463.009	454.297	(1,88%)
Tabungan	674.471	707.599	752.522	6,35%
Deposito	227.130	227.867	229.297	0,63%
Bank Swasta	365.619	385.953	404.660	4,85%
Giro	35.514	43.049	48.050	11,62%
Tabungan	213.268	223.064	228.831	2,59%
Deposito	116.837	119.840	127.779	6,62%

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

Dalam penghimpunan dana tersebut, bank-bank swasta mengalami peningkatan lebih tinggi (4,85%) dibanding dengan bank pemerintah (2,69%).

d. Perkembangan Penyaluran Kredit

Peningkatan penyaluran kredit lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga. Menurut jenis penggunaannya, semua jenis kredit mengalami peningkatan berturut-turut konsumsi, modal kerja, dan investasi dengan peningkatan masing-masing sebesar 12,45%, 10,57%, dan 8,80% (Tabel 3.4.).

Dilihat dari sisi sektor ekonomi yang dibiayai, peningkatan kredit terbesar terjadi di sektor jasa sosial (187,84%) disusul oleh sektor konstruksi (60,34%) dan sektor pertanian (15,86%). Sedangkan penurunan kredit terjadi pada 2 sektor yaitu sektor perindustrian (-29,07%) dan sektor pengangkutan (-12,30%).

Namun demikian, jika dilihat dari nominal, sektor lain-lain (sebagian besar merupakan kredit konsumsi) mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar Rp99.742 juta diikuti oleh sektor pertanian

dengan peningkatan sebesar Rp21.565 juta dan sektor konstruksi sebesar Rp17.643 juta (Tabel 3.4.).

Tabel 3.4. Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan, Sektor Ekonomi dan Kelompok Bank di Provinsi Bengkulu

juta rupiah (kecuali persentase pertumbuhan)

Keterangan	2004	2005			Pertumbuhan	
	Q-1	Q-2	Q-3	Rp.	%	
Jenis Penggunaan	1.352.167	1.461.556	1.627.286	165.730	11,34%	
Modal Kerja	427.242	462.932	511.882	48.950	10,57%	
Investasi	204.369	206.536	224.721	18.185	8,80%	
Konsumsi	720.556	792.088	890.683	98.595	12,45%	
Sektor Ekonomi	1.352.167	1.461.556	1.627.286	165.730	11,34%	
Pertanian	139.492	135.968	157.533	21.565	15,86%	
Pertambangan	886	966	1.005	39	4,04%	
Perindustrian	15.420	15.464	10.969	(4.495)	(29,07%)	
Listrik, Air dan Gas	894	778	819	41	5,27%	
Konstruksi	25.356	29.237	46.880	17.643	60,34%	
Perdagangan	311.654	353.902	359.549	5.647	1,60%	
Pengangkutan	30.639	28.025	24.578	(3.447)	(12,30%)	
Jasa dunia usaha	89.905	87.730	101.339	13.609	15,51%	
Jasa sosial	8.317	8.191	23.577	15.386	187,84%	
Lain-lain	729.604	801.3295	901.037	99.742	12,45%	
Kelompok Bank	1.352.167	1.461.556	1.627.286	165.730	11,34%	
Bank Pemerintah	1,087,486	1.179.162	1.307.044	127.882	10,85%	
Bank Swasta	264.681	282.394	320.242	37.848	13,40%	

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

Dari sisi nominal kredit, jumlah kredit yang disalurkan oleh bank-bank Pemerintah (Rp1.307.044 juta) masih lebih besar dibandingkan dengan bank swasta (Rp320.242 juta). Pada triwulan ini pertumbuhan kredit bank swasta lebih tinggi yaitu 13,40% bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit bank Pemerintah sebesar 10,85%.

Tabel 3.5. Perkembangan Kredit Usaha Kecil di Provinsi Bengkulu

juta rupiah (kecuali persentase pertumbuhan)

Keterangan	2005			Pertumbuhan	
	Q-1	Q-2	Q-3	Rp.	%
KUK	398.770	434.256	476.349	42.093	9,69%
Total Kredit	1.352.167	1.461.556	1.627.286	109.389	8,09%
Proporsi (%)	26,63%	29,71%	29,27%	(0,44%)	

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum – Bank Indonesia Bengkulu

Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) bank-bank umum di Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan III tahun 2005 meningkat sebesar Rp42.093 juta atau 9,69% dari Rp434.256 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi sebesar Rp476.349 juta pada Triwulan III tahun 2005.

Proporsi total KUK terhadap total kredit di Provinsi Bengkulu cenderung tetap dimana pada triwulan ini proporsi KUK sedikit mengalami penurunan (0,44%) yaitu dari sebesar 29,71% pada triwulan sebelumnya menjadi 29,27% pada Triwulan III tahun 2005. (Tabel 3.5.).

Penyaluran kredit ini masih perlu ditingkatkan karena usaha kecil merupakan usaha yang padat karya sehingga berperan sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja.

3.1.3. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat

Aktiva Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan bila dibandingkan periode sebelumnya. Total aset BPR meningkat 3,68% yaitu dari Rp14.564 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi Rp15.100 juta pada Triwulan III tahun 2005 (Tabel 3.6.).

Jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2005, pada Triwulan III tahun 2005 total kredit 4 BPR yang ada di Provinsi Bengkulu meningkat sebesar 8,52% sementara penghimpunan dana pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar 4,36%. Laju peningkatan kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan dana pihak ketiga ini meningkatkan LDR dari 125,36% pada Triwulan II tahun 2005 menjadi 130,36% pada triwulan berjalan.

Tabel 3.6. Perkembangan Kegiatan Usaha BPR di Provinsi Bengkulu

juta rupiah (kecuali persentase pertumbuhan)

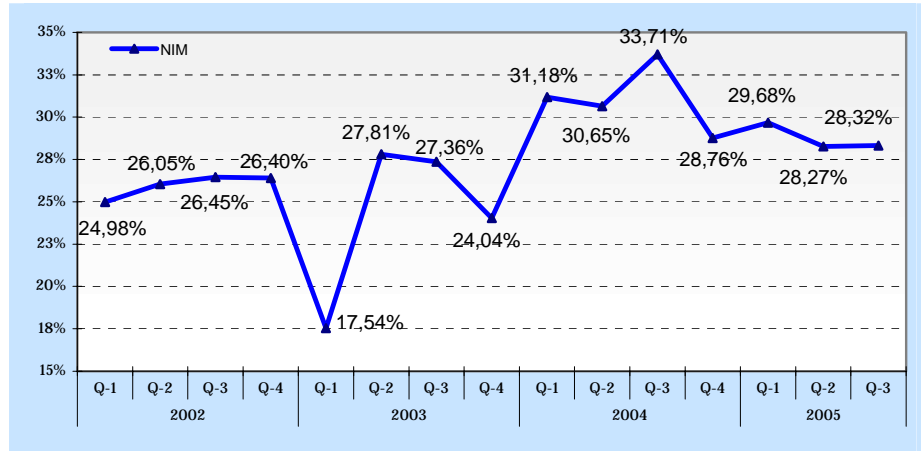
Keterangan	2004		2005			Pertumbuhan q-t-q
	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	
Total Aktiva	12.187	13.087	13.708	14.564	15.100	3,68%
Kredit	10.185	10.290	10.355	11.294	12.256	8,52%
DPK	7.152	7.701	8.349	9.009	9.402	4,36%
LDR (%)	142,41%	133,62%	124,03%	125,36%	130,36%	5,00%

Sumber : Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat – Bank Indonesia Bengkulu

Pencapaian laba usaha terutama dari *spread* bunga yang diperoleh BPR di wilayah Bengkulu sedikit meningkat sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan *Net Interest Margin* (NIM) yaitu dari 28,27% pada Triwulan II tahun 2005 menjadi 28,32% pada periode Triwulan III tahun 2005. Namun bila dibandingkan dengan perolehan pada periode Triwulan III tahun 2004, jumlah yang dicapai saat ini jauh lebih rendah, di mana pada

periode Triwulan III tahun 2004 NIM mencapai sebesar 33,71% (Grafik 3.4.).

Grafik 3.4. Perkembangan Net Interest Margin BPR Provinsi Bengkulu



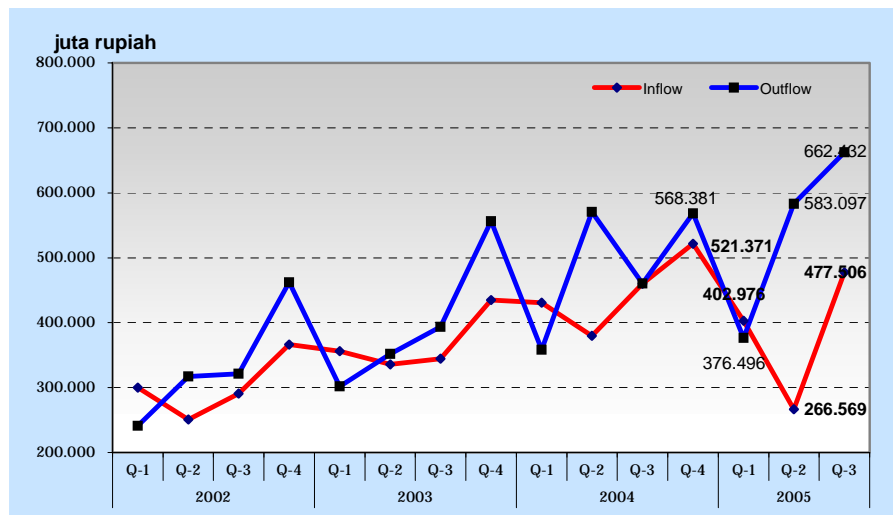
Sumber : Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat – Bank Indonesia Bengkulu; diolah

3.2. Sistem Pembayaran

3.2.1. Aliran Uang Kartal (*Outflow/Inflow*)

Aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia Bengkulu jauh meningkat bila dibandingkan dengan aliran uang masuk pada triwulan sebelumnya. Aliran uang yang keluar dari Bank Indonesia Bengkulu juga mengalami peningkatan. *Net outflow* yang terjadi pada triwulan sebelumnya masih terjadi pada triwulan ini (Tabel 3.7.).

Grafik 3.5. Perkembangan Inflow-Outflow Uang Kartal Provinsi Bengkulu



Sumber : Kantor Bank Indonesia Bengkulu

Aliran *inflow* meningkat pesat dari Rp266.569 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi sebesar Rp477.506, atau meningkat sebesar Rp210.937 juta (79,13%) Aliran *outflow* juga mengalami peningkatan sebesar Rp79.335 juta (13,61%) yaitu dari Rp583.097 juta pada Triwulan II tahun 2005 menjadi Rp662.432 juta pada Triwulan III tahun 2005 (Tabel 3.7.).

Tabel 3.7. Perkembangan *Inflow-Outflow* Uang Kartal Provinsi Bengkulu

Keterangan	2005			Pert. q-t-q
	Q-1	Q-2	Q-3	
Inflow	402.976	266.569	477.506	210.937
Outflow	376.496	583.097	662.432	79.335
Netflow	26.480	(316.528)	(184.926)	

Sumber : Kantor Bank Indonesia Bengkulu

3.2.2. *Clean Money Policy*

Clean money policy adalah upaya Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dalam pecahan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung misi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelayanan penyeteroran dan pembayaran kepada perbankan, penukaran uang untuk masyarakat umum dan kas keliling.

Penyediaan uang yang layak edar dilakukan dengan cara mengganti uang yang lusuh (tidak layak edar) dengan uang baru. Dalam hal ini Bank Indonesia Bengkulu membuka pelayanan kepada masyarakat untuk menukarkan uang lusuh, uang pecahan besar ke uang pecahan kecil pada setiap hari Senin dan Kamis. Sementara untuk penggantian uang rusak dapat dilakukan setiap hari kerja kecuali hari Jumat.

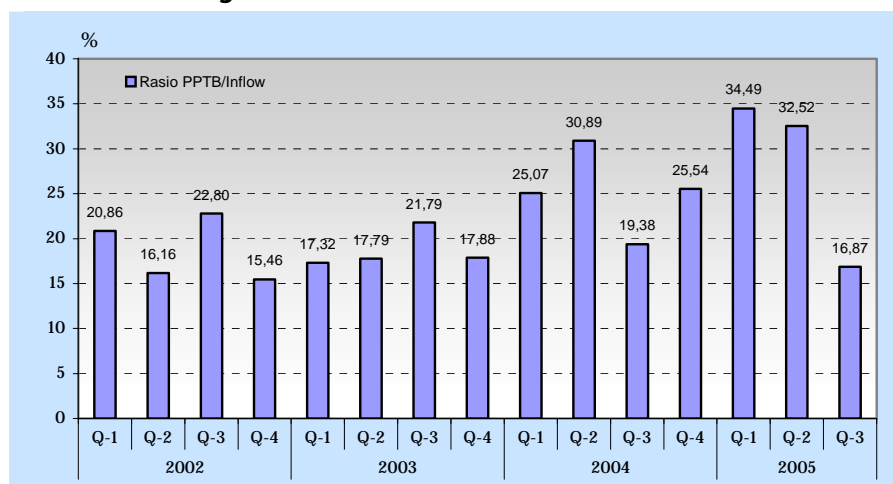
Guna memberikan kesempatan penukaran uang kepada masyarakat yang lokasinya jauh dari KBI Bengkulu, Bank Indonesia melakukan kas keliling ke pasar-pasar tradisional di beberapa wilayah/kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Uang yang sudah tidak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia selanjutnya akan dimusnahkan melalui proses peracikan atau Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dengan menggunakan mesin racik.

Rasio jumlah PTTB terhadap *inflow* di Bank Indonesia Bengkulu menurun pada periode laporan bila dibandingkan periode sebelumnya.

Rasio PTTB terhadap *inflow* pada Triwulan II tahun 2005 sebesar 16,87% turun 15,65% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 32,52% (Grafik 3.6.).

Grafik 3.6. Perkembangan Rasio PTTB terhadap *Inflow* Provinsi Bengkulu



Sumber : Kantor Bank Indonesia Bengkulu

Walaupun tidak mempengaruhi kondisi perekonomian secara langsung, namun semakin tinggi rasio PPTB maka semakin meningkat biaya yang harus dikeluarkan Bank Indonesia untuk mencetak uang baru. Untuk itu masyarakat diminta agar memperlakukan uang dengan baik agar tidak cepat lusuh dan tetap layak edar.

3.2.3. Penemuan uang palsu

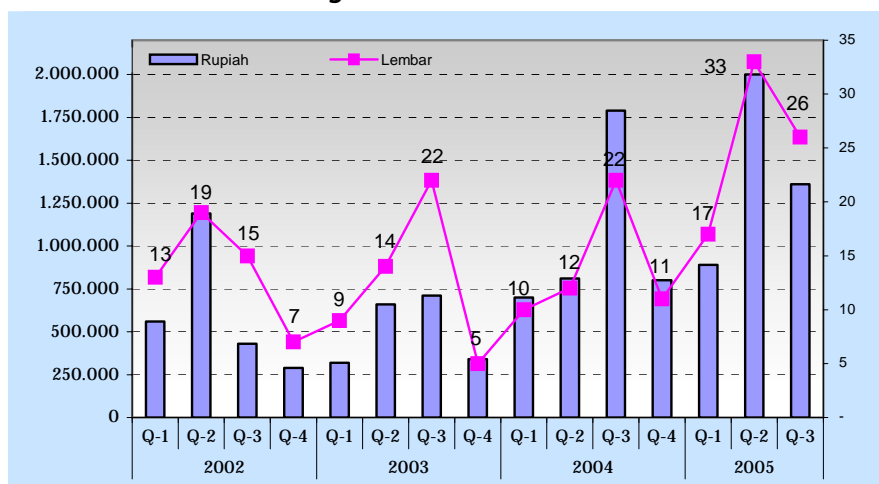
Uang palsu yang dilaporkan oleh masyarakat dan bank kepada Bank Indonesia Bengkulu pada Triwulan III tahun 2005 berjumlah 26 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp1,36 juta. Baik lembar maupun nominal uang palsu yang dilaporkan menurun jumlahnya dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 33 lembar dengan nominal sebesar Rp2 juta (Grafik 3.7.).

Dari jumlah tersebut, apabila dilihat dari jenis pecahan uang palsu yang ditemukan dan dilaporkan selama periode laporan terlihat bahwa pecahan yang dipalsukan adalah pecahan Rp100.000,00 sampai dengan pecahan Rp5.000,00. Pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp50.000,00.

Untuk mencegah peningkatan peredaran uang palsu, Bank Indonesia Bengkulu melakukan beberapa langkah pencegahan seperti melalui

penyelenggaraan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, penyebaran brosur dan pamflet di seluruh kelurahan dan juga melalui iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik.

Grafik 3.7. Perkembangan Jumlah Uang Palsu yang Ditemukan di Provinsi Bengkulu



Sumber : Kantor Bank Indonesia Bengkulu

3.2.4. Perkembangan Kliring Lokal

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam rangka meningkatkan penggunaan alat pembayaran giral di Provinsi Bengkulu, maka Bank Indonesia Bengkulu menyelenggarakan kegiatan kliring lokal di Kota Bengkulu untuk transaksi dengan nilai nominal dibawah Rp100 juta. Untuk transaksi dengan nilai nominal Rp100 juta keatas, digunakan sistem Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yaitu transaksi pembayaran antar bank secara *online* dan seketika.

Untuk mendukung upaya giralisasi dan mengembangkan perekonomian daerah maka Bank Indonesia juga memberlakukan kliring antar wilayah (*intercity clearing*) sehingga warkat luar kota dapat diproses dalam kliring lokal setempat.

Kegiatan kliring di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan bila dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah warkat yang dikliringkan naik sebesar 16,12% yaitu dari 22.724 lembar pada triwulan lalu menjadi 26.386 lembar pada Triwulan III tahun 2005. Nominal kliring perbankan di wilayah Bengkulu juga meningkat (21,38%) yaitu dari Rp267.212 juta

pada Triwulan II tahun 2005 menjadi Rp324.353 juta pada triwulan laporan (Tabel 3.8.).

Tabel 3.8. Perkembangan Kliring dan Cek/Bilyet Giro Kosong Provinsi Bengkulu

Keterangan	2004		2005			Pertumbuhan
	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	
Bank Peserta Kliring	9	9	9	9	10	
Perputaran Kliring						
Warkat (lembar)	24.044	23.756	20.295	22.724	26.386	16,12%
Nominal (juta Rp.)	394.586	568.730	270.519	267.212	324.353	21,38%
Rata-Rata Perputaran Kliring per Hari						
Warkat (lembar)	382	383	344	367	412	12,49%
Nominal (juta Rp.)	6.263	9.173	4.585	4.310	5.068	17,59%
% Penolakan Cek dan Bilyet Giro						
Warkat (lembar)	1,16%	1,23%	0,97%	0,75%	1,03%	0,28%
Nominal (juta Rp.)	1,02%	0,83%	0,85%	0,98%	1,58%	0,60%

Sumber : Kantor Bank Indonesia Bengkulu

Peningkatan aktivitas kliring ini merupakan cerminan meningkatnya kembali aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu setelah sebelumnya mengalami kelesuan.

Tingkat penolakan cek dan bilyet giro dalam nominal dan lembar meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penolakan nominal dalam persentase sudah berada diatas 1,5%. Peningkatan jumlah penolakan dalam kliring akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan menurunkan penggunaan uang giral.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Krisis moneter dan perbankan yang terjadi tahun 1997 telah menyebabkan gejolak dalam lembaga keuangan yang mengakibatkan instabilitas industri perbankan dan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi pada masa krisis tersebut.

Untuk mencegah penurunan kepercayaan masyarakat lebih jauh terhadap sistem perbankan dan kejatuhan industri perbankan, pemerintah melakukan program penjaminan (*blanket guarantee*) yang merupakan pemberian jaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum dan BPR baik dalam rupiah maupun valuta asing termasuk nasabah penyimpan dan kreditur.

Penjaminan pemerintah tersebut telah menimbulkan dilema karena di satu sisi dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun di sisi lain membuat pemerintah harus menanggung beban anggaran yang besar. Disamping itu, penjaminan pemerintah dapat menimbulkan *moral hazard* disebabkan pemikiran bahwa pemerintah telah menjamin seluruh kewajiban pembayaran bank sehingga pemilik/pengelola bank menjadi kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perbankan.

Terkait dengan permasalahan tersebut dan pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan suatu sistem asuransi simpanan terbatas yang eksplisit, akhirnya mendorong untuk dibentuknya suatu lembaga yang khusus yang melakukan penjaminan terhadap kewajiban bank yang sifatnya terbatas yang disebut LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang LPS dan mulai berjalan efektif sejak tanggal 22 September 2005.

LPS bertujuan untuk melindungi simpanan nasabah, mengurangi *moral hazard* dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar, membatasi beban keuangan negara dan menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank.

Dalam menjalankan tugasnya LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsi LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan melalui upaya penanganan dan penyelesaian bank gagal sesuai dengan kewenangannya.

LPS berwenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan tata cara penjaminan simpanan nasabah dan kebijakan penanganan dan penyelesaian bank gagal, memungut premi dan kontribusi awal peserta, mengelola kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan informasi yang diperlukan serta menetapkan sanksi administratif kepada bank peserta.

LPS menjamin simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan yang nilai penjaminannya per nasabah per bank ditetapkan dengan pentahapan sejak 22 September 2005 seluruh simpanan dijamin, kemudian sejak **22 Maret 2006** nilai simpanan yang dijamin maksimal **Rp 5 milyar** per nasabah per bank, sejak **22 September 2006** maksimal **Rp 1 milyar** per nasabah per bank dan sejak **22 Maret 2007** maksimal **Rp 100 juta** per nasabah per bank.

Pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah dan apabila nasabah juga memiliki kewajiban kepada bank, pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan kewajibannya (set off). *Klaim tidak dapat dibayarkan apabila data nasabah tidak tercatat di bank, nasabah diuntungkan secara tidak wajar misalnya memperoleh bunga yang nilainya lebih tinggi dari suku bunga yang dijamin oleh LPS, dan nasabah yang merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.*

Sumber dana LPS berasal dari modal awal yang berasal dari pemerintah sebesar Rp 4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan oleh bank peserta pada saat pertama kali menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan peserta setiap semester yang besarnya 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan per semester, dan hasil investasi cadangan penjaminan. *Setiap bank yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS baik bank umum dan BPR, bank konvensional dan syariah serta bank nasional, bank campuran dan bank asing.*

Organisasi LPS dipimpin oleh Dewan Komisiner yang diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri Keuangan yang terdiri dari 6 (enam) orang berasal dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan masing-masing 1 (satu) orang serta 3 (tiga) orang profesional yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS. Salah satu dari anggota Dewan Komisiner ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif yang menjalankan kegiatan operasional LPS.

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN BPR/BPRS

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (cek dan bilyet giro). Sebagai bagian dari perbankan nasional, BPR turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha. Berikut kami sampaikan tanya jawab seputar syarat-syarat pendirian BPR/BPRS.

Siapa saja yang dapat memiliki Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS)?

BPR/BPRS dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, Pemerintah Daerah, atau gabungan dari ketiganya.

Berapa besar modal yang dibutuhkan untuk pendirian BPR/BPRS?

Modal disetor minimum untuk pendirian BPR/BPRS di Kota Bengkulu (Ibukota Provinsi) adalah sebesar Rp1 miliar, sedangkan untuk di kabupaten selain Kota Bengkulu minimal sebesar Rp500 juta.

Apakah setiap orang/badan hukum yang memiliki uang sebesar persyaratan pendirian BPR/BPRS dapat mendirikan BPR/BPRS?

Disamping memiliki kelayakan keuangan, pada prinsipnya calon pemilik BPR/BPRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank Umum, BPR/BPRS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- b. Memiliki integritas antara lain; memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan operasional BPR/BPRS yang sehat.

Untuk calon pemegang saham pengendali BPR/BPRS (memiliki saham sebesar 25% atau lebih), penilaian tersebut dilakukan melalui *fit and proper test*.

Siapa yang memberikan izin pendirian BPR/BPRS?

Izin pendirian BPR/BPRS diberikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia yang pemberiannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

- a. Persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian BPR/BPRS, dan
- b. Izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha BPR/BPRS setelah persiapan selesai dilakukan.

Bagaimana cara mengajukan permohonan persetujuan prinsip?

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan oleh calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan format yang sudah ditetapkan dilampiri dengan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar.
- b. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
- c. Daftar calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia.
- e. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR/BPRS.
- f. Rencana kerja, sistem dan prosedur kerja.
- g. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik".
- h. Surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dari bank dan atau pihak lain, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Berapa lama proses permohonan persetujuan prinsip?

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan berlaku untuk jangka waktu 360 hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.

Setelah persetujuan prinsip diberikan, bolehkah kegiatan usaha dilakukan?

Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.

Bagaimana cara mengajukan permohonan izin usaha?

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh Direksi kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan format yang sudah ditetapkan dilampiri dengan:

- a. Akta pendirian BPR/BPRS, termasuk anggaran dasar.
- b. Daftar pemegang saham.
- c. Daftar susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia.
- e. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik".
- f. Surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dari bank dan atau pihak lain, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- g. Bukti kesiapan operasional.

Berapa lama proses permohonan izin usaha?

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Setelah izin usaha diberikan, bolehkah kegiatan usaha dilakukan?

BPR/BPRS yang telah mendapat izin usaha wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut BPR/BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Mengenai Calon Pengurus BPR/BPRS, apakah ada persyaratan tertentu?

Secara garis besar pengurus (terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi) BPR/BPRS harus memenuhi persyaratan: kompetensi, integritas dan kelayakan keuangan melalui *fit and proper test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Khusus mengenai kompetensi calon Direksi BPR disamping diperlukan persyaratan pendidikan formal minimal setingkat D-3 dan mempunyai pengalaman dalam operasional perbankan minimal 2 tahun, juga wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat pendirian BPR/BPRS, dapat menghubungi Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia terdekat.

PENERBITAN UANG BARU PECAHAN Rp50.000 DAN Rp10.000

Pada tanggal 20 Oktober 2005, Bank Indonesia akan mengeluarkan uang rupiah baru pecahan Rp50.000 dan Rp10.000. Penerbitan uang kertas emisi baru ini karena usia edar pecahan sebelumnya sudah cukup lama (yaitu 6 tahun untuk uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 1999 dan 7 tahun untuk pecahan Rp10.000 tahun emisi 1998), standarisasi ukuran uang kertas, meningkatkan kualitas unsur pengaman yang dapat dengan mudah dan cepat dikenali masyarakat, serta sebagai antisipasi perkembangan teknologi pengaman uang yang mutakhir.

Uang pecahan Rp 50.000 tahun emisi 2005 bergambar utama Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai di bagian depan dan gambar Danau Beratan di Bedugul, Bali, pada bagian belakang. Sedangkan uang pecahan Rp 10.000 tahun emisi 2005 bergambar utama Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II di bagian depan dan gambar Rumah Limas di Palembang pada bagian belakang.

Uang kertas pecahan baru ini juga mengakomodasikan kebutuhan para tuna netra dengan menyediakan kode tertentu (*blind code*) di samping kanan bagian muka uang dan dilengkapi dengan benang pengaman yang jauh lebih lebar dan terlihat seperti dianyam (*windowed*). Ciri-ciri lainnya dari pecahan baru ini berupa nomor seri yang berjenis teleskopik dan tidak simetris (asimetris) serta tinta berubah warna (*OVI/optical variable ink*).

Dengan diedarkannya ke dua uang baru tersebut, uang pecahan Rp50.000 Tahun Emisi 1999 dan Rp10.000 Tahun Emisi 1998 masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

BAB

4

KEUANGAN DAERAH

4.1. Gambaran Sisi Penerimaan

Sumber dana APBD Provinsi Bengkulu sebagian besar berasal dari pemerintah pusat berupa **Dana Perimbangan** seperti bagi hasil pajak dan bukan pajak, **Dana Alokasi Umum (DAU)** sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi dan **Dana Alokasi Khusus (DAK)**.

Dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan limpahan dana terbesar yaitu Rp240.650,00 juta (18,60%) diikuti oleh Kota Bengkulu sebesar Rp191.706,75 juta (14,82%) dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp188.965,00 juta (14,61%). Sedangkan Kabupaten Kepahiang mendapat limpahan dana terendah yaitu Rp52.010,21 juta atau 4,02% (Tabel 4.1.).

Tabel 4.1. Rekapitulasi Anggaran Pendapatan yang Diterima Provinsi Bengkulu Tahun 2005

juta rupiah (kecuali dinyatakan lain)

Wilayah	Pendapatan Asli Daerah	%	Dana Perimbangan	%	Pendapatan Lainnya	%	APBD	%
1. Provinsi Bengkulu	97.329,52	66,82	240.650,00	18,60	7.040,00	12,30	345.019,52	23,06
2. Kota Bengkulu	16.979,85	11,66	191.706,75	14,82	1.600,00	2,80	210.286,60	14,05
3. Bengkulu Selatan	5.462,82	3,75	114.210,31	8,83	7.921,00	13,84	127.594,13	8,53
4. Kaur	1.067,65	0,73	84.926,10	6,57	4.180,00	7,30	90.173,75	6,03
5. Seluma	3.033,53	2,08	110.238,86	8,52	8.728,00	15,25	122.000,39	8,15
6. Bengkulu Utara	5.892,99	4,05	188.965,00	14,61	8.762,00	15,31	203.619,99	13,61
7. Muko-Muko	1.219,48	0,84	102.448,82	7,92	3.620,00	6,33	107.288,30	7,17
8. Rejang Lebong	10.665,20	7,32	140.779,85	10,88	6.679,00	11,67	158.124,05	10,57
9. Kepahiang	1.869,95	1,28	52.010,21	4,02	6.997,00	12,23	60.877,16	4,07
10. Lebong	2.145,00	1,47	67.546,00	5,22	1.699,00	2,97	71.390,00	4,77
Jumlah	145.665,99	100	1.293.481,90	100	57.226,00	100	1.496.373,89	100

Sumber: Nota APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan laba BUMD masih relatif kecil. Dari total PAD tersebut, Provinsi Bengkulu merupakan penyumbang PAD terbesar 66,82% (Tabel 4.1.) sedangkan Kabupaten Kaur sebagai salah satu Kabupaten baru hasil pemekaran, hanya menyumbang PAD sebesar 0,73% dari total keseluruhan PAD Provinsi Bengkulu.

Anggaran pendapatan Kabupaten Kaur mengalami peningkatan tertinggi (50,67%) yaitu dari Rp59.847,7 juta pada tahun 2004 menjadi Rp90.173,75 juta pada tahun 2005 diikuti oleh Kabupaten Muko-Muko dengan peningkatan sebesar 45,60% yaitu dari Rp73.686,2 juta pada tahun 2004 menjadi Rp107.288,30 juta pada tahun 2005 (Tabel 4.2.).

Tabel 4.2. Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 dan 2005

juta rupiah (kecuali dinyatakan lain)

Wilayah	APBD 2004	APBD 2005	Pertumbuhan	
			Nominal	Persentase
1. Provinsi Bengkulu	312.543,7	345.019,52	32.475,82	10,39%
2. Kota Bengkulu	208.391,4	210.286,60	1.895,20	0,91%
3. Bengkulu Selatan	123.226,6	127.594,13	4.367,53	3,54%
4. Kaur	59.847,7	90.173,75	30.326,05	50,67%
5. Seluma	95.317,1	122.000,39	26.683,29	27,99%
6. Bengkulu Utara	225.897,0	203.619,99	(22.277,01)	(9,86%)
7. Muko-Muko	73.686,2	107.288,30	33.602,10	45,60%
8. Rejang Lebong	259.411,2	158.124,05	(110.287,15)	(39,05%)
9. Kepahiang	-	60.877,16	60.877,16	∞
10. Lebong	-	71.390,00	71.390,00	∞
Jumlah	1.358.320,9	1.496.373,89	138.052,99	10,16%

Sumber: Nota APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota

Sementara itu, anggaran pendapatan Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan sebesar -39,05%. Penurunan ini disebabkan oleh pemekaran Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

4.2. Gambaran Sisi Pengeluaran

Total anggaran pengeluaran Provinsi Bengkulu tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp1.646.663,67 juta atau defisit sebesar Rp150.289,78 juta (Tabel 4.3.). Sebagian besar defisit dibiayai dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Tabel 4.3. Rekapitulasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2005

Uraian	Jumlah Anggaran (Juta Rp)	Pangsa (%)
PENDAPATAN	1.496.373,89	100%
Pendapatan Asli Daerah	145.665,99	9,73%
Dana Perimbangan	1.293.481,90	86,44%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	57.226,00	3,82%
BELANJA	1.646.633,67	100%
Belanja Aparatur Daerah	760.768,34	46,20%
Belanja Pelayanan Publik	760.239,74	46,17%
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	114.863,92	6,98%
Belanja Tidak Tersangka	10.791,67	0,66%
Defisit	(150.289,78)	

Sumber : Nota APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota

Pengeluaran untuk membiayai pos belanja aparatur daerah dan pos pelayanan publik relatif berimbang dengan anggaran masing-masing sebesar Rp760.768,34 juta (46,20%) dan Rp760.239,74 juta (46,17%). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk membiayai pos belanja bagi hasil dan belanja tidak tersangka.

Pengeluaran untuk membiayai pos belanja aparatur daerah dan pos pelayanan publik relatif berimbang dengan anggaran masing-masing sebesar Rp760.768,34 juta (46,20%) dan Rp760.239,74 juta (46,17%). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk membiayai pos belanja bagi hasil dan belanja tidak tersangka.

Tabel 4.4. Rekapitulasi Anggaran Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2005 menurut Kabupaten/Kota

juta rupiah (kecuali dinyatakan lain)

Wilayah	Belanja Aparatur Daerah	%	Belanja Pelayanan Publik	%	Belanja Bagi Hasil	%	Belanja Tidak Terduga	%
1. Provinsi Bengkulu	211.178,79	27,76	157.319,23	20,69	50.052,38	43,57	5.000,00	46,33
2. Kota Bengkulu	145.006,52	19,06	63.035,14	8,29	5.147,02	4,48	500,00	4,63
3. Bengkulu Selatan	25.847,68	3,40	107.446,45	14,13	4.393,00	3,82	985,52	9,13
4. Kaur	34.370,88	4,52	56.076,68	7,38	6.604,68	5,75	100,00	0,93
5. Seluma	52.063,14	6,84	65.697,04	8,64	10.522,99	9,17	175,00	1,62
6. Bengkulu Utara	82.837,05	10,89	124.255,59	16,34	15.506,21	13,50	2.021,15	18,73
7. Muko-Muko	61.523,48	8,09	42.015,89	5,53	5.810,74	5,06	1.000,00	9,27
8. Rejang Lebong	57.641,41	7,58	97.976,38	12,89	9.710,31	8,45	560,00	5,19
9. Kepahiang	29.118,37	3,83	39.295,55	5,17	4.171,59	3,63	200,00	1,85
10. Lebong	61.181,02	8,04	7.121,79	0,94	2.945,00	2,56	250,00	2,32
Jumlah	760.768,34	100	760.239,74	100	114.863,92	100	10.791,67	100

Sumber: Nota APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota

Pada Triwulan III tahun 2005, realisasi upah dan gaji meningkat sebesar 31,00%, yaitu dari Rp161.879,5 juta pada triwulan sebelumnya menjadi Rp212.068,9 juta (Tabel 4.5.).

Tabel 4.5. Realisasi Upah/Gaji Pemerintah Daerah Dirinci Menurut Kabupaten/Kota

juta rupiah

Provinsi/Kabupaten/Kota	Triwulan I 2005	Triwulan II 2005	Triwulan III 2005*
1. Provinsi Bengkulu	22.649,6	23.025,8	30.170,5
2. Kota Bengkulu	28.429,7	28.685,6	37.578,1
3. Bengkulu Selatan	18.658,7	18.697,9	24.494,2
4. Kaur	7.632,9	7.709,2	10.099,1
5. Seluma	12.537,6	12.586,5	16.488,3
6. Bengkulu Utara	27.770,8	27.890,2	36.536,2
7. Muko-Muko	7.911,7	7.975,8	10.448,3
8. Rejang Lebong	21.947,6	22.112,2	28.967,0
9. Kepahiang	6.869,3	6.929,1	9.077,1
10. Lebong	6.210,1	6.267,2	8.210,1
Jumlah	160.618,0	161.879,5	212.068,9

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

* Perkiraan BPS Provinsi Bengkulu

BAB

5

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN HARGA

5.1. Prospek Perekonomian

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), perkembangan kegiatan usaha pada Triwulan IV tahun 2005 diperkirakan akan meningkat cukup tinggi (Saldo Bersih Tertimbang; SBT 28,68%). Semua sektor yang ada diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Sektor pertanian diperkirakan akan mengalami peningkatan tertinggi (SBT - 11,30) yang disebabkan oleh ekspektasi peningkatan harga komoditas kelapa sawit. Sektor lain yang mengalami peningkatan tertinggi adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel (SBT 5,35) diikuti oleh sektor jasa –jasa (SBT 5,06).

Peningkatan sektor pertanian yang tinggi ini diharapkan mampu mendorong perekonomian Bengkulu karena sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi penggerak bagi perkembangan perekonomian di Provinsi Bengkulu.

Tabel 5.1. Perkiraan Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha di Provinsi Bengkulu

Sektor	Saldo bersih tertimbang (%)	
	Perkiraan	Q3-2005
Pertanian	11,30	
Pertambangan dan Penggalian	0,89	
Industri Pengolahan	1,37	
Bangunan	2,52	
Perdagangan, Restoran dan hotel	5,35	
Pengangkutan dan Komunikasi	0,28	
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,90	
Jasa-jasa	5,06	
Jumlah	28,68	

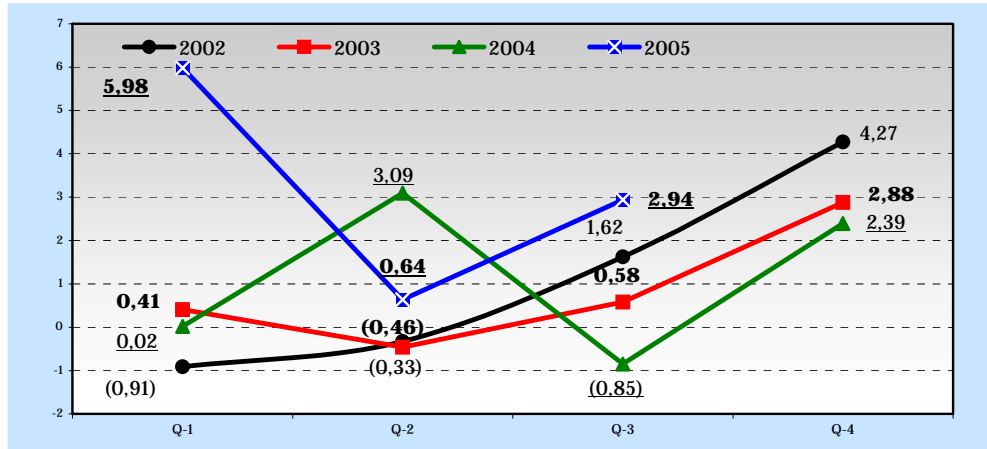
Sumber : Hasil Survei P2B FE UNIB atas permintaan Bank Indonesia

5.2. Prospek Harga

Pola inflasi triwulanan dalam 3 tahun terakhir (2002 – 2004) menunjukkan bahwa inflasi pada Triwulan IV menunjukkan kecenderungan meningkat

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 5.1.). Kecenderungan peningkatan laju inflasi pada Triwulan IV disebabkan karena pada triwulan ini terjadi peningkatan konsumsi masyarakat karena memasuki perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal serta Tahun Baru.

Grafik 5.1. Pola Inflasi Triwulanan Kota Bengkulu



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Selain disebabkan oleh naiknya permintaan barang dan jasa, tekanan inflasi pada Triwulan IV tahun 2005 ini diperkirakan juga berasal dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Walaupun rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini sudah diantisipasi masyarakat pada Triwulan III tahun 2005, namun kenaikan harga barang dan jasa diperkirakan akan terus berlanjut setelah pengumuman kenaikan harga BBM.

Tabel 5.2. Perkembangan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia

Bahan Bakar	19 Des 2004	1 Mar 2005	1 Okt 2005	Kenaikan
Premium	Rp1.810	Rp2.400	Rp4.500	87.5%
Solar	Rp1.650	Rp2.100	Rp4.300	104.7%
Minyak Tanah	Rp700	Rp700	Rp2,000	185.7%

Sumber : Peraturan Pemerintah No.55/2005

Pada tanggal 30 September 2005, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.55/2005 tentang Kenaikan Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri yang menaikkan harga jual BBM mulai tanggal 1 Oktober 2005. Sebelumnya masyarakat memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM berada pada kisaran 50% seperti yang dikabarkan pemerintah sebelumnya, namun kenyataannya kenaikan harga yang diumumkan pemerintah jauh lebih tinggi dari perkiraan dan mencapai sekitar 100% (Tabel 5.2.).

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik, pada bulan Oktober 2005 inflasi Bengkulu mencapai 12,51% (m-t-m) sehingga inflasi Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV tahun 2005 diperkirakan akan sangat tinggi hingga mencapai 12%-15% (q-t-q). Inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2005 diperkirakan melampaui 20% (y-o-y).

Hasil Survei Ekspektasi Konsumen menunjukkan adanya ekspektasi konsumen bahwa rata-rata harga jual barang dan jasa secara umum akan meningkat (NS 12,6). Alasan utama konsumen memperkirakan kenaikan harga barang dan jasa ini adalah karena penurunan/pencabutan subsidi pemerintah, kurs rupiah akan melemah dan situasi keamanan/sosial politik yang tidak stabil.

Sementara dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha juga didapat bahwa hampir dua pertiga (62,30%) responden dunia usaha yang ada di Provinsi Bengkulu memperkirakan bahwa inflasi akan berada di antara 10%-20%.

DAFTAR ISTILAH

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka.

Deflasi

Penurunan harga barang dan jasa kebutuhan rumahtangga secara agregat antara satu periode dengan periode sebelumnya.

Harmonized System

Standar internasional untuk penomoran dan penamaan dalam pengklasifikasian barang dagangan yang diatur oleh *World Customs Organization*.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indikator inflasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan perubahan harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi rumahtangga.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumahtangga secara agregat antara satu periode dengan periode sebelumnya.

Month-to-month (m-t-m)

Perbandingan tingkat harga barang dan jasa saat ini dengan harga barang dan jasa pada bulan lalu.

Year-on-year (y-o-y)

Perbandingan tingkat harga barang dan jasa saat ini dengan harga barang dan jasa pada tahun lalu.

Year-to-date (y-t-d)

Perbandingan tingkat harga barang dan jasa saat ini dengan harga barang dan jasa pada awal tahun.

Bekerja

Bekerja merupakan kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus.

Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pencari Kerja

Pencari Kerja (Penganggur Terbuka) merupakan usaha mendapatkan pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya asalkan masih dalam status menunggu jawaban lamaran, dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan.

Pengangguran Tertutup

Penganggur Tertutup adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu. Secara teknis statistik penganggur tertutup disebut juga setengah penganggur atau penganggur tidak penuh atau penganggur terselubung.

Pekerja

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (TPT)

Nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit Usaha Kecil (KUK)

Kredit Investasi dan atau Modal Kerja dengan plafon maksimum Rp500 juta untuk pembiayaan usaha produktif.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Perbandingan jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana yang diterima oleh bank.

Net Interest Margin (NIM)

Selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga setahun (disetahunkan) dibagi dengan rata-rata aktiva produktif.

Non-Performing Loan (NPL)

Kredit-kredit yang tergolong non-lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keseluruhan nilai tambah bruto (NTB) dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah.

Real-Time Gross Settlement (RTGS)

Penyelesaian kewajiban pembayaran (*settlement*) yang dilakukan secara *online* atau seketika untuk setiap instruksi transfer data.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei triwulanan terhadap 120 responden di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan P2B Unib dan bertujuan untuk mendapatkan indikator dini mengenai kecenderungan arah kegiatan dunia usaha.

Analisis kegiatan usaha dihitung berdasarkan Saldo Bersih tertimbang (SBT), yaitu dengan membandingkan antara jawaban responden yang mengatakan kegiatan usaha meningkat dan yang mengatakan menurun.

Survei Ekspektasi Konsumen (SEK)

Survei triwulanan terhadap 150 responden di 4 kecamatan kota Bengkulu yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan P2B Unib dan bertujuan untuk mendapatkan indikator dini tentang sisi permintaan pada sektor riil.

Analisis ekspektasi konsumen dihitung dengan metode Saldo Bersih (*net balance*), yaitu dengan memperhitungkan selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban positif dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban negatif.

Untuk keperluan penyajian analisis, maka nilai 100 ditambahkan pada saldo bersih yang kemudian disebut Nilai Saldo (NS).

Upah

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah terendah yang dibayarkan kepada pekerja pada saat mulai bekerja dengan jabatan terendah.
